



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
IBU KOTA KECAMATAN PUCUK

Kata Pengantar
Kata Pengantar



Kata Pengantar

Sebagai laporan pertama dari proses penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk adalah Penyerahan Buku "*LAPORAN PENDAHULUAN*", buku laporan tahap pertama ini berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, tinjauan wilayah yang diidentifikasi, konsepsi pendekatan teoritis/metode pendekatan yang akan digunakan maupun mekanisme kerja dalam proses perencanaan ini.

Dengan terselesaikannya buku laporan tahap pertama ini diharapkan dapat memperlancar dan membantu proses penyusunan laporan-laporan selanjutnya.

Lamongan, Juli 2001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Peta	iv

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan dan Sasaran	I - 2
1.3. Ruang Lingkup Perencanaan	I - 5
1.4. Dasar Hukum	I - 6
1.5. Jangka Waktu Perencanaan	I - 10
1.6. Sistematika Pembahasan	I - 11

Bab II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

2.1. Karakteristik Kependudukan	II - 2
2.2. Karakteristik Fisik Dasar	II - 6
2.3. Penggunaan Lahan	II - 8
2.4. Karakteristik Perekonomian.....	II - 11
2.5. Fasilitas Pelayanan Kota	II - 11
2.6. Karakteristik Transportasi	II - 12
2.7. Permasalahan Wilayah Kota Pucuk.....	II - 13

Bab III. TINJAUAN PROSES PERENCANAAN

3.1. Kedudukan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk Dalam Perencanaan Kota	III - 1
3.2. Dasar-Dasar Perencanaan.....	III - 2
3.2.1. Pengertian Dasar	III - 3
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perencanaan	III - 5



3.2.3. Prinsip Dasar	III - 8
3.2.4. Ketentuan Teknis Perencanaan	III - 10
3.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	III - 18
3.3.1. Pendekatan Spasial	III - 19
3.3.2. Pendekatan Sektoral.....	III - 21
3.3.2.1. Sektor Ekonomi Perkotaan.....	III - 21
3.3.2.2. Sektor Perumahan.....	III - 23
3.3.2.3. Sektor Jalan Kota	III - 25
3.3.2.4. Sektor Utilitas.....	III - 27
3.3.3. Pendekatan Aspek Institusi/Kelembagaan	III - 31

Bab IV. SISTEMATIKA PENJADWALAN DAN PELAPORAN

4.1. Tahapan Teknis Pekerjaan	IV - 1
4.1.1. Tahap Persiapan Survey	IV - 2
4.1.2. Tahap Kegiatan Survey	IV - 3
4.1.3. Tahap Kegiatan Kompilasi Data.....	IV - 4
4.1.4. Tahap Kegiatan Analisa.....	IV - 8
4.1.5. Tahap Rancangan Rencana	IV - 12
4.1.6. Tahap Rencana	IV - 16
4.2. Sistematika Pelaporan	IV - 18

Bab V. STRUKTUR ORGANISASI

5.1. Struktur Organisasi	V - 1
5.2. Mekanisme Pekerjaan	V - 2
5.2.1. Mekanisme Kerja Ekstern	V - 3
5.2.2. Mekanisme Kerja Intern Konsultan	V - 3

Lampiran: Check List Data



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel: 2.1. Distribusi Penduduk Kota Pucuk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2000 II - 2

Tabel: 2.2. Kepadatan Penduduk Kota dan Kecamatan Pucuk
Tahun 2000 II - 6

Tabel: 2.3. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah
Di Kota Pucuk Tahun 2000..... II - 9

Tabel: 4.1. Time Schedule Kegiatan Penyusunan RUTRK dengan
kedalaman RDTRK Kota PucukIV - 17

Tabel: 5.1. Time Schedule Tenaga Ahli Pelaksana Penyusunan
RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Pucuk.....IV - 8

Bagan: 3.1. Kerangka Penyusunan RUTRK dengan kedalaman
RDTRK Kota Pucuk Tahun 2010 III - 20

Bagan: 3.2. Kerangka Pemikiran Pendekatan Analisis Sosek
RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Pucuk III - 23

Bagan: 3.3. Alur Pemikiran Penetapan Kebutuhan Lahan Perumahan..... III - 25

Bagan: 3.4. Kerangka Umum Perencanaan Transportasi..... III - 26

Bagan: 3.5. Tahapan Dalam Perencanaan Sistem Jaringan Jalan III -27

Bagan: 3.6. Kerangka Pemikiran Perencanaan Pengadaan Air Bersih
RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Pucuk III - 29

Bagan: 3.7. Gambaran Umum Sistem Penanganan Sampah III - 30

Bagan: 3.8. Analisis Aspek Kelembagaan RUTRK dengan kedalaman
RDTRK Kota Pucuk III -32

Bagan: 5.1. Hubungan Kerja Penyusunan RUTRK dengan kedalaman
RDTRK Kota PucukV - 2



DAFTAR PETA

Peta: 2.1. Kedudukan Wilayah Kecamatan Pucuk Terhadap Wilayah
Kabupaten Lamongan II - 3

Peta: 2.2. Kedudukan Wilayah Kota Pucuk Terhadap Wilayah
Kecamatan Pucuk..... II - 4

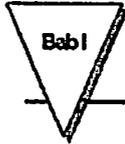
Peta: 2.3. Orientasi Wilayah Kota Pucuk Berdasarkan Perda
Kabupaten Lamongan No. 20 Tahun 1988 II - 5

Peta: 2.4. Penggunaan Tanah Kota Pucuk..... II - 10

Bab I

PENDAHULUAN

RUTRK/RDTRK KOTA PUCUK



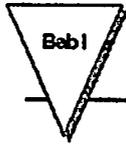
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan kota-kota di Indonesia yang semakin pesat dewasa ini membawa banyak perubahan pada kondisi internal kota. Hal-hal yang tampak nyata sebagai dampak dari perkembangan kota adalah pesatnya perkembangan penduduk perkotaan, tingginya angka kepadatan penduduk akibat keterbatasan lahan perkotaan dalam mengakomodasi kepesatan perkembangan penduduk, pesatnya perkembangan daerah terbangun, yang pada gilirannya menimbulkan tingginya kebutuhan akan fasilitas dan utilitas kota termasuk kebutuhan akan perumahan.

Pesatnya perkembangan kota ini tampaknya tidak hanya terjadi pada kota-kota metropolitan saja, namun telah mencapai kota-kota menengah dan bahkan kota-kota kecil tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat potensinya sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam mendukung terjalinnya interaksi mutualisme antara pusat perkembangan wilayah dengan daerah hinterlandnya. Dengan demikian maka seyogyanya penataan kota tidak hanya mencakup kota besar sebagai pusat pengembangan saja, tetapi juga kota-kota kecil yang dalam banyak hal lebih berfungsi sebagai pengaruh atau wilayah hinterland. Dengan adanya kegiatan penataan kota-kota kecil tersebut maka



proses interaksi antar komponen-komponen dalam sistem pengembangan wilayah tersebut akan berjalan lebih efisien dan efektif.

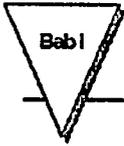
Apabila ditinjau secara mikro, tampak bahwa kota-kota kecil, yang sebagian besar merupakan Ibukota Kecamatan, ternyata tidak hanya berperan sebagai wilayah hinterland saja. Namun kadang juga berfungsi sebagai agent of development dan growth centre bagi wilayah yang belum berciri kekotaan disekitarnya. Jelas bahwa penataan kota-kota kecil merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam rangka mengembangkan kota-kota kecil dan menjalarkan proses pembangunan sampai kedaerah-daerah maka mulai Repelita V, Pemerintah telah merencanakan program penyusunan Rencana kota Ibukota-Ibukota Kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan yang potensial sebagai kebijaksanaan yang bersifat regional.

Untuk mengantisipasi kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga telah mengarahkan program penyusunan rencana kota ibukota-ibukota kecamatan wilayah Propinsi Jawa Timur dalam bentuk Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, serta Rencana Teknik Ruang Kota.

1.2. Tujuan Dan Sasaran

Rencana Umum Tata Ruang Kota pada hakekatnya merupakan rencana tata ruang yang mendasari strategi pembangunan fisik kota, baik yang



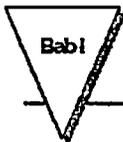
menyangkut perencanaan tata ruang yang lebih terinci seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota maupun Rencana Kegiatan Sektoral.

Rencana Detail Tata Ruang Kota di pihak lain merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal Daerah, Swasta, maupun oleh Masyarakat.

Penyusunan rencana dalam skala yang masih bersifat umum ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah.

Dalam pada itu Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan Rencana Tata Ruang Kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarah lokasi dari berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan pemukiman yang memiliki karakteristik tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah



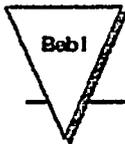
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sendiri, serta masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencana Sektoral dan Wilayah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan. Selajutnya, Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun harus mampu menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Secara lebih detail, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah berupa kebijaksanaan, strategi dan rencana itu sendiri. Ketiga bentuk keluaran tersebut tertuang dalam pola pengembangan kota yang sifatnya regional dan pola pengembangan kota yang sifatnya lokal.

Pola pengembangan kota yang sifatnya regional akan berkaitan dengan masalah penentuan fungsi dan peranan kota serta rumusan arah ekstensifikasi pengembangan kota dimasa mendatang. Pola pengembangan kota yang bersifat lokal dilain pihak akan menyangkut arahan mengenai struktur tata ruang, penggunaan lahan, kependudukan, fasilitas dan utilitas, serta arahan program implementasi rencana kota.

Sementara itu penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan menciptakan keseimbangan dan



keserasian lingkungan yang merupakan upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota maka akan lebih mudah bagi pengelola kota dalam menyusun atau menjabarkan ke dalam Rencana Teknik Ruang Kota serta akan mempermudah dalam menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan/dalam jangka pendek.

1.3. Ruang Lingkup Perencanaan

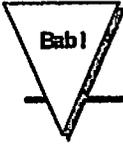
Sebagai tahap awal dari suatu perencanaan kota, maka pada hakekatnya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan dasar bagi penyusunan rencana tata ruang kota yang hirarkinya lebih rendah. Diperlukan 2 tinjauan ruang dalam proses penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Pucuk, yaitu tinjauan eksternal dan tinjauan internal. Tinjauan eksternal bertujuan untuk mengamati dan

menentukan peranan, fungsi, hirarki, ataupun kedudukan dari kota yang akan direncanakan terhadap kota-kota atau pusat-pusat pemukiman lain dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

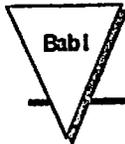
1.4. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Pucuk adalah :

1. Undang-undang No. 5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Jalan.
3. Undang-undang No. 5 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2823);
4. Undang-undang No. 11 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2831);
5. Undang-undang No. 11 Th. 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3064);
6. Undang-undang No. 5 Th. 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 No. 3274);

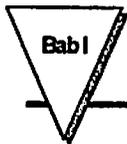


7. Undang-undang No. 9 Th. 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 No. 3299);
8. Undang-undang No. 5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Th. 1990 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Th. 1990 No. 3419);
9. Undang-undang No. 9 Th. 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Th. 1990 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Th. 1990 No. 3427);
10. Undang-undang No. 4 Th. 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Th. 1992 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Th. 1992 No. 3469);
11. Undang-undang No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Th. 1992 No 27, Tambahan Lembaran Negara Th. 1992 No. 3470);
12. Undang-undang No. 12 Th. 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
13. Undang-undang No. 14 Th. 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
14. Undang-undang No. 24 Th. 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Th. 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Th. 1992 No. 3501);
15. Undang-Undang No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Th. 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Th. 1999 No. 3839);
17. Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok



- Pertambahan (Lembaran Negara Th. 1970 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Th. 1970 No. 2916);
18. Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Th. 1970 No. 50, Tambahan Lembaran Negara Th. 1970 No. 2945);
19. Peraturan Pemerintah No. 22 Th. 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Th. 1982 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Th. 1982 No. 3225);
20. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Th. 1982 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Th. 1982 No. 3226);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
22. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Th. 1985 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Th. 1985 No. 3294);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan.
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 Th.1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

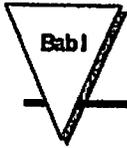
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah.
31. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota.
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Mei 1985 Nomor 24 Tahun 1985 tentang Larangan Perubahan Fungsi Tanah Bengkok, Taman Kota, Kebun Binatang dan Lapangan Olahraga.
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.



37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah.
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejanis Tanah Kas Desa.
39. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
40. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya.
41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Gantai.
42. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110-1284 tentang Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 tahun 1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah kota.

1.5. Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan tata ruang untuk Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang kota Ibukota Kecamatan Pucuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 adalah



selama 10 tahun dimulai dari awal perencanaan yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan usulan teknis ini maka sistematika pembahasan usulan teknis diatur sesuai dengan tatanan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran potensi dan permasalahan dalam penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk baik dalam konstelasi Kabupaten maupun dalam konteks internal kawasan perencanaan. Selain itu diuraikan pula latar belakang diperlukannya penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk, tujuan dan sasaran perencanaan, ruang lingkup perencanaan, Dasar hukum serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisikan uraian mengenai kondisi wilayah perencanaan yang meliputi kondisi eksisting atas aspek kependudukan, guna lahan dan beberapa aspek pengenal yang menjadi orientasi atas wilayah perencanaan.

BAB III TINJAUAN PROSES PERENCANAAN

Bab ini berisikan metodologi pendekatan dalam penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk. Bab ini juga berisi materi-materi pembahas yang akan dirumuskan dan metode pemecahan yang akan digunakan dalam dokumen selanjutnya.

BAB IV SISTEMATIKA PENJADWALAN DAN PELAPORAN

Bab ini berisikan uraian tentang ruang lingkup kegiatan serta tahapan atau langkah kegiatan dalam proses penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk dengan jadwal penyelesaian tiap tahapan kegiatan beserta sistematika penyerahan dan ketentuan teknis laporan kemajuan pekerjaan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPISISI TENAGA AHLI

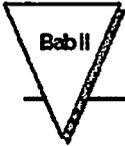
Bab ini berisikan uraian struktur organisasi team perencana dalam menangani pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk beserta keterlibatan tenaga ahli dengan tugasnya selama proses penyusunan tersebut.

Bab II



GAMBARAN UMUM
WILAYAH

RUTRK/RDTRK KOTA PUCUK



BAB II

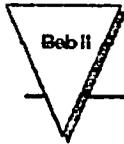
GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN KOTA PUCUK

Wilayah Kota Pucuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 1988 tentang penetapan "Batas Wilayah Kota di Kabupaten Lamongan", wilayah Desa Pucuk ditetapkan berstatus sebagai Ibukota Kecamatan Pucuk.

Secara administratif wilayah Kota Pucuk seperti yang telah ditetapkan dalam perda tersebut hanya meliputi wilayah administrasi Desa Pucuk saja, akan tetapi melihat apa yang terjadi dilapangan dalam kurun waktu 12 tahun telah banyak sekali perkembangan kegiatan perkotaan keluar dari wilayah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada tahun anggaran 1999/2000 telah diadakan penyesuaian terhadap Perda Batas Wilayah Kota IKK Pucuk, dimana dari hasil identifikasinya terdiri dari 7 wilayah Desa secara keseluruhan dan 4 sebagian wilayah Desa. Keseluruhan dari luas wilayah IKK Pucuk menurut hasil identifikasi tersebut adalah seluas 1.856,02 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Batas kawasan rawa/waduk;
- Sebelah Timur : Batas Kecamatan Sukodadi;
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Kecamatan Sugio;



Sebelah Barat : Batas wilayah Kecamatan Babat.

Untuk lebih jelasnya lihat Peta 2.1, 2.2 dan 2.3

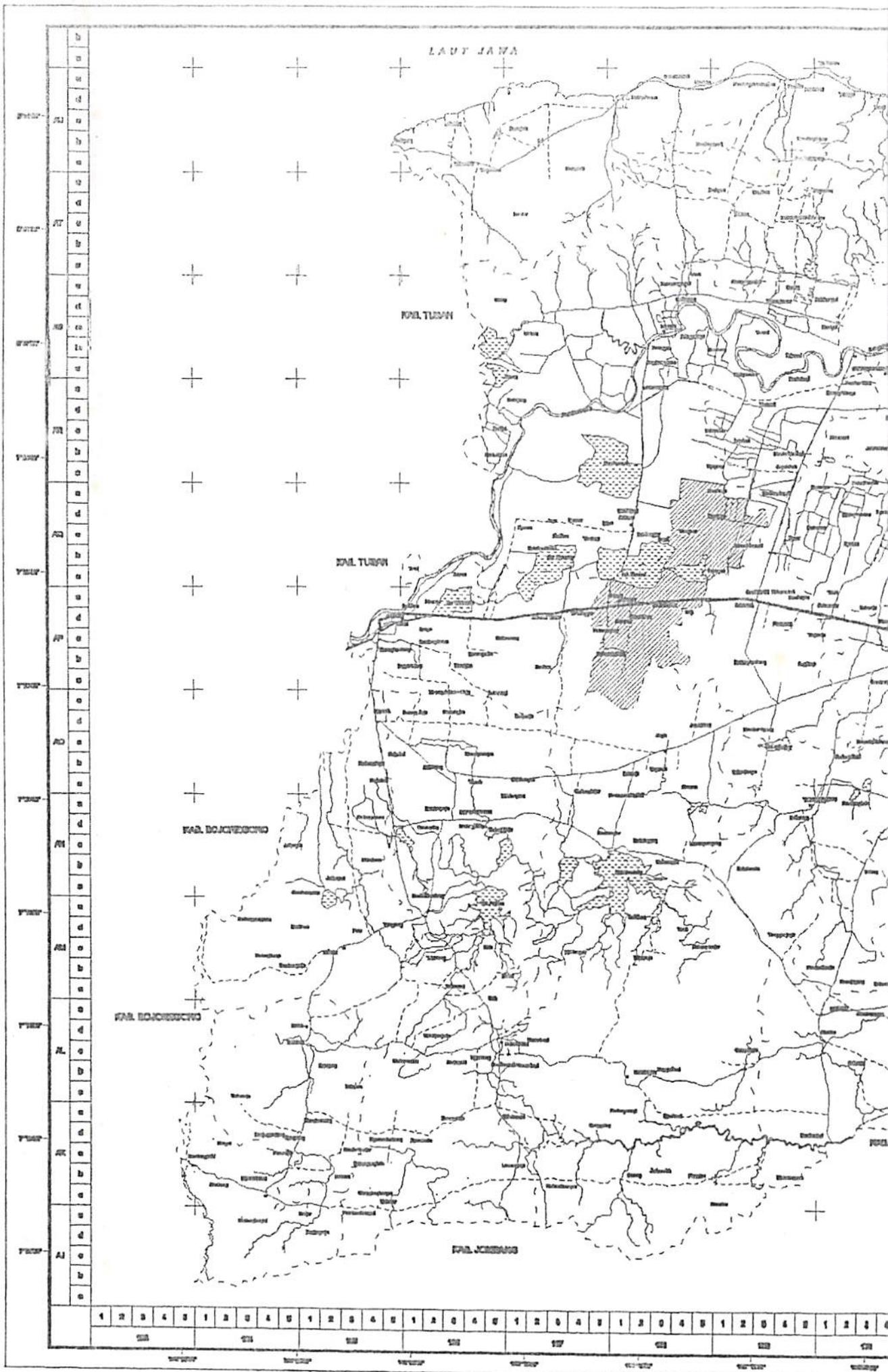
2.1. Karakteristik Kependudukan

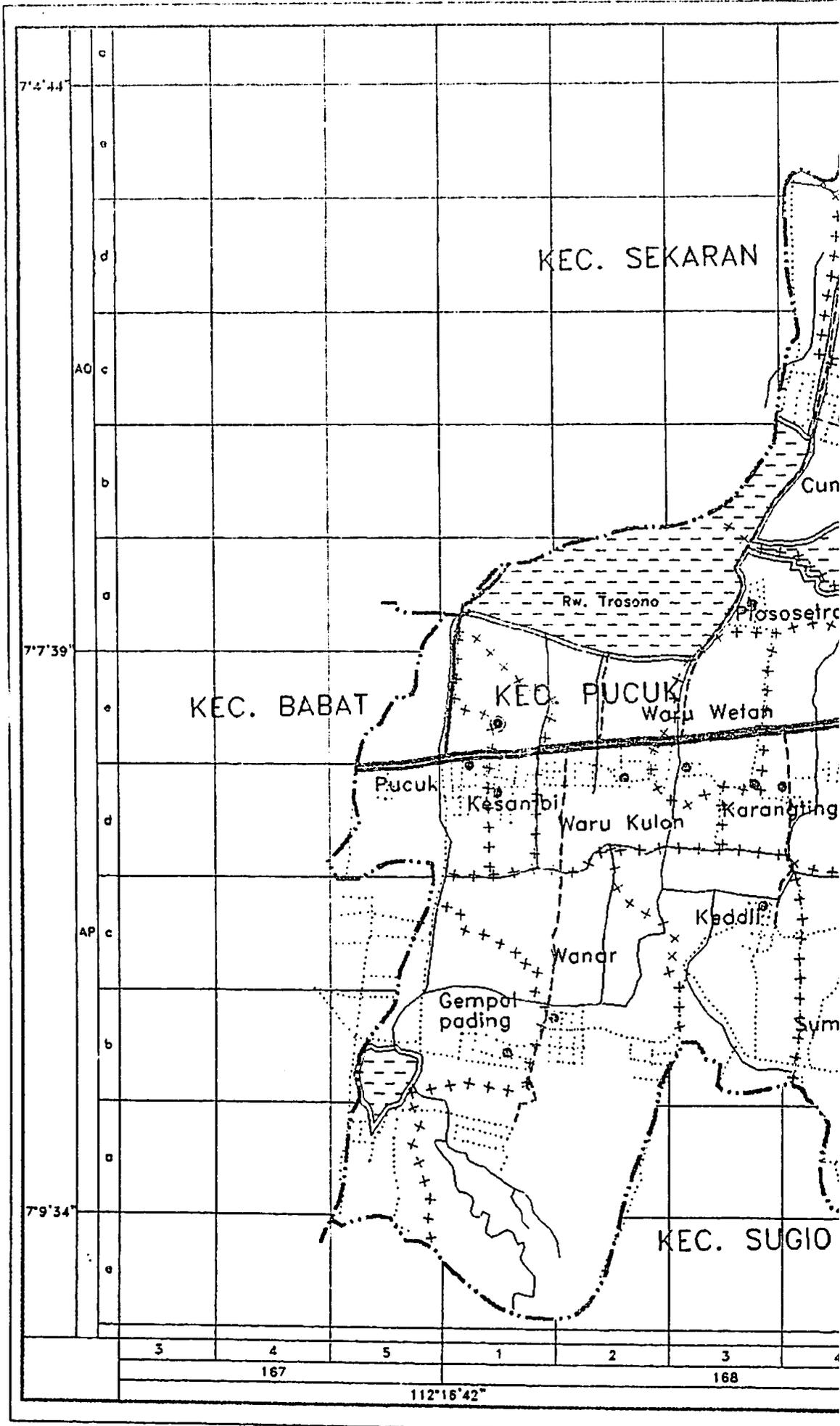
Berdasarkan data registrasi penduduk Kecamatan Pucuk, pada bulan Desember 1999, jumlah penduduk Kota Pucuk tercatat sebanyak 26.488 jiwa, terdiri dari laki-laki tercatat sebanyak 12.874 jiwa dan perempuan tercatat sebanyak 13.614 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel: 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1.
Distribusi Penduduk Kota Pucuk Menurut Jenis Kelamin
Pada Tahun 2000

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pucuk	1.562	1.581	3.143
Kesambi	852	907	1.759
Warukulon	1.780	2.005	3.785
Waruwetan	583	519	1.102
Paji	1.015	1.053	2.068
Karangtinggil	682	693	1.375
Kedali	736	765	1.501
Tanggungan	1.281	1.350	2.631
Sumberejo	1.147	1.260	2.407
Plosetro	760	737	1.497
Wanar	2.476	2.744	5.220
Jumlah	12.874	13.614	26.488

Sumber : Data Kantor Kecamatan Pucuk





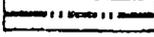
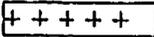
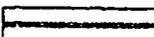
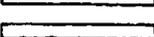
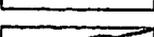
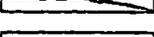


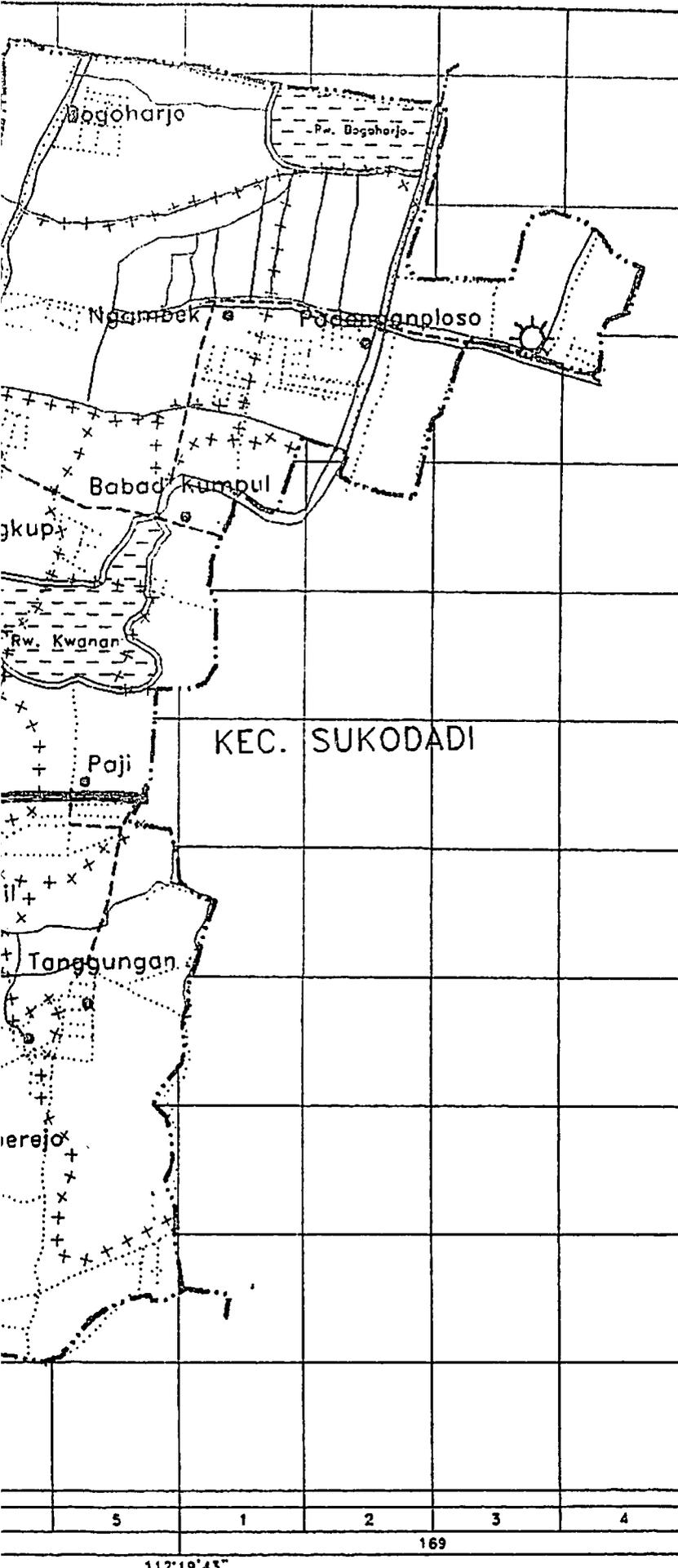
PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK PUCUK

PETA
KEDUDUKAN WILAYAH KOTA PUCUK
TERHADAP WILAYAH KECAMATAN PUCUK

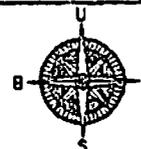
KETERANGAN:

-  BATAS KECAMATAN
-  BATAS DESA
-  JALAN ASPAL
-  JALAN BATU
-  JALAN TANAH
-  REL KA
-  SUNGAI
-  KANTOR KECAMATAN
-  KANTOR DESA
-  DANAU/RAWA



SUMBER : KANTOR PERTANAHAN KAB.

NO. GAMBAR : 2.2



0 0.20 0.40 Km

5

1

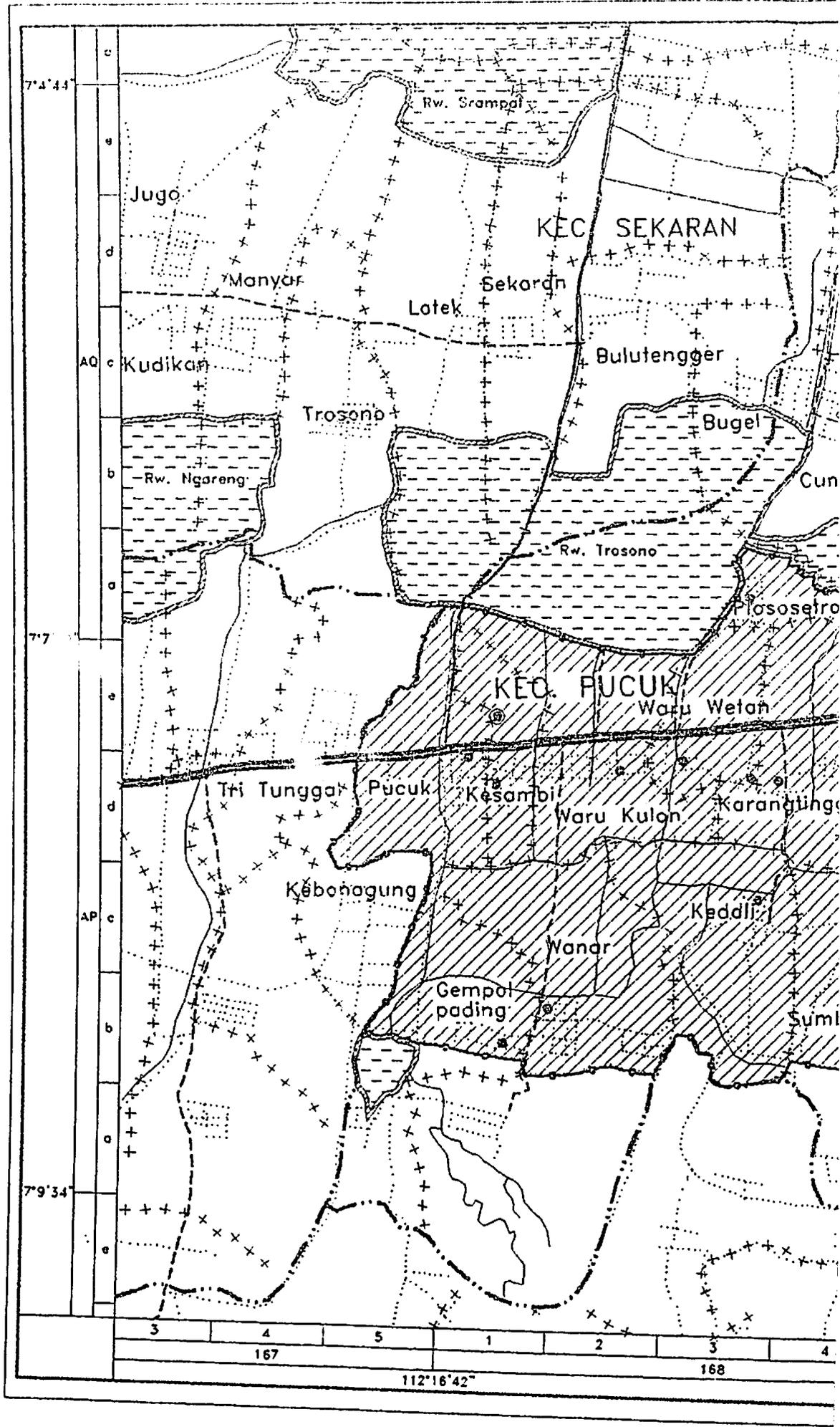
2

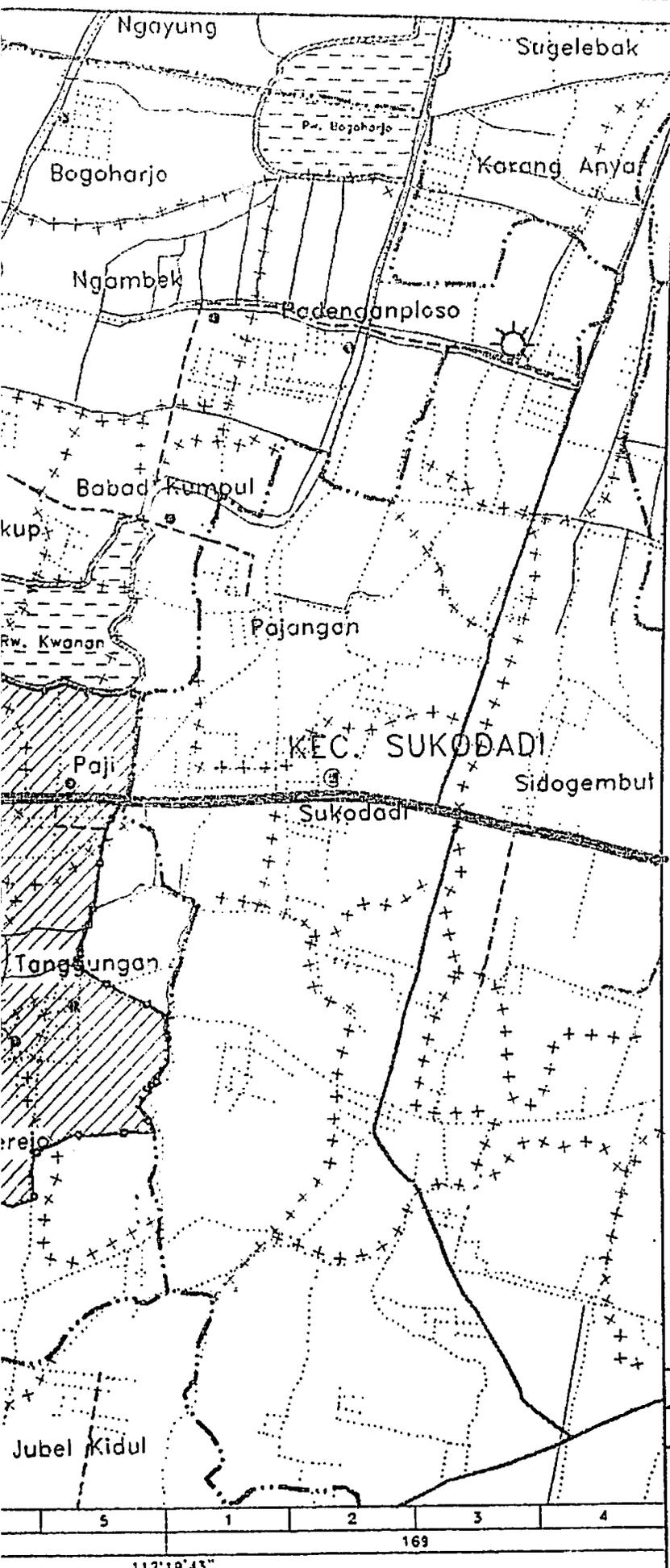
3

4

169

112°19'43"



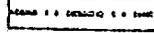
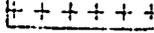
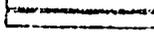
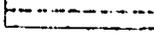
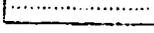
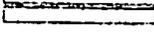
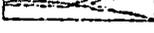
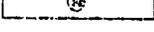
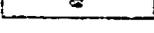
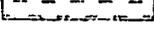
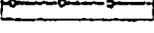
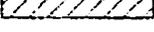


**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK PUCUK**

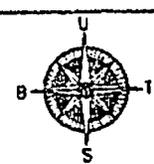
**ORIENTASI WILAYAH KOTA PUCUK
BERDASARKAN PERDA KAB. LAMONGAN
NO. 20 TAHUN 1988**

KETERANGAN:

-  BATAS KECAMATAN
-  BATAS DESA
-  JALAN ASPAL
-  JALAN BATU
-  JALAN TANAH
-  REL KA
-  SUNGAI
-  KANTOR KECAMATAN
-  KANTOR DESA
-  DANAU/RAWA
-  SUMBER/MATA AIR
-  BATAS WILAYAH KOTA
-  WILAYAH PERKOTAAN

SUMBER : KANTOR PERTANAHAN KAR. LAMONGAN

NO. GAMBAR : 2.3



0 0,20 0,80 Km

112°19'43"

169

Tabel 2.2.
Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Pucuk
Pada Tahun 2000

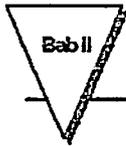
Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Pucuk	3,143	186.390	17
Kesambi	1,759	84.000	21
Warukulon	3,785	162.292	23
Waruwetan	1,102	101.600	11
Paji	2,068	215.190	10
Karangtinggil	1,375	119.700	11
Kedali	1,501	185.790	8
Tanggung	2,631	335.000	8
Sumberejo	2,407	3.390	710
Plosetro	1,497	136.000	11
Wanar	5,220	569.010	9
Jumlah	26.488	2.098.362	76

Sumber : Data Kantor Kecamatan Pucuk

2.2. Karakteristik Fisik Dasar

Secara geografis Kota Pucuk secara fisik permukaan tanahnya landai dengan tingkat kemiringan 0-5% diseluruh wilayah Kota Pucuk ataupun wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah perkotaan.

Secara Topografis Kota Pucuk terletak pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan air laut dengan kedalaman efektifitas tanah sebagian wilayah kota antara 60 – 90 Cm sedangkan selatan relatif dangkal antara 30 – 60 Cm,



jadi kondisi Kota Pucuk tergolong relatif kurang subur, sehingga kurang sesuai untuk tanaman produktif pangan kecuali pada jenis usaha perikanan dan jenis pertanian tanaman keras.

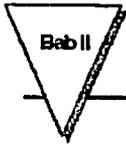
Pertumbuhan kota cenderung dimulai dari pusat kegiatan pemerintahan jasa dan perdagangan dibagian utara dari sisi jaringan jalan arteri primer, berkembang dengan mengikuti pola jaringan jalan dan membentuk pola linier dan sentris menuju pusat kota.

Kecepatan angin rata-rata antara 20–28 knot kearah selatan. Sedangkan temperatur rata-rata di wilayah Kota Pucuk antara 28^oC–36^oC dengan curah hujan kurang dari 2.217 mm per tahun dengan hari hujan yang tercatat dalam satu tahun berkisar antara 90-129 hari hujan dan rata-rata perhari antara 118-204 mm. Musim penghujan berlangsung antara Bulan Nopember s/d April dan musim kemarau antara Mei s/d Oktober.

Air baku yang dimanfaatkan oleh penduduk Kota Pucuk adalah air tanah dan air permukaan. Air tanah diperoleh dari sumur pompa dan sumur terbuka/galian serta dari danau. Adapun air yang dipergunakan untuk minum dan masak masih menggunakan air dari sumur/pompa.

Adapun fasilitas drainase di perkampungan kurang berfungsi dengan baik sebagai desakan kebutuhan pembangunan perumahan penduduk serta dangkalnya alur jaringan yang ada.

Pertumbuhan kota cenderung membentuk pola linear yang mengikuti bentuk jalan utama (Arteri Primer) dan jalan lokal. Hal ini dapat dijelaskan



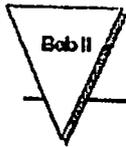
sebagai berikut pada pusat kota berkembang dengan mengikuti pola jaringan jalan dan membentuk pola linier menuju pusat kota.

Tingkat konsentrasi pola permukiman penduduk pada jalan arteri primer dan jalan lokal primer dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak jauh dari jalan. Fasilitas listrik PLN telah masuk di semua wilayah Desa dalam Kota Pucuk melalui jaringan SUTM dan SUTR. Namun demikian belum seluruh rumah dan bangunan perumahan berlangganan listrik PLN. Fasilitas sambung telepon juga telah masuk Kota Pucuk mencakup Kota Pucuk dan sekitarnya.

2.3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kota Pucuk saat ini didominasi oleh kegiatan persawahan tadah hujan. Kegiatan yang mempunyai ciri kekotaan saat ini terkonsentrasi pada jaringan jalan utama yang berupa kegiatan perdagangan dan jasa (pasar, toko, kios-kios dan bengkel) serta beberapa sarana pendidikan.

Penyebaran perumahan saat ini masih terkonsentrasi pada jalur utama dan sebagian mengisi bagian dalam meskipun hanya beberapa rumah saja. Khusus perumahan yang berada di bagian sisi jaringan jalan arteri primer yang terkonsentrasi mendekati kantor Kecamatan kearah utara. Kondisi diatas akan semakin terasa tidak nyaman karena karena letak kantor kecamatan justru berada disisi jaringan jalan arteri sehingga masyarakat di bagian selatan dihadapkan dengan tingkat keramaian dengan lintasan jalan arteri tersebut,



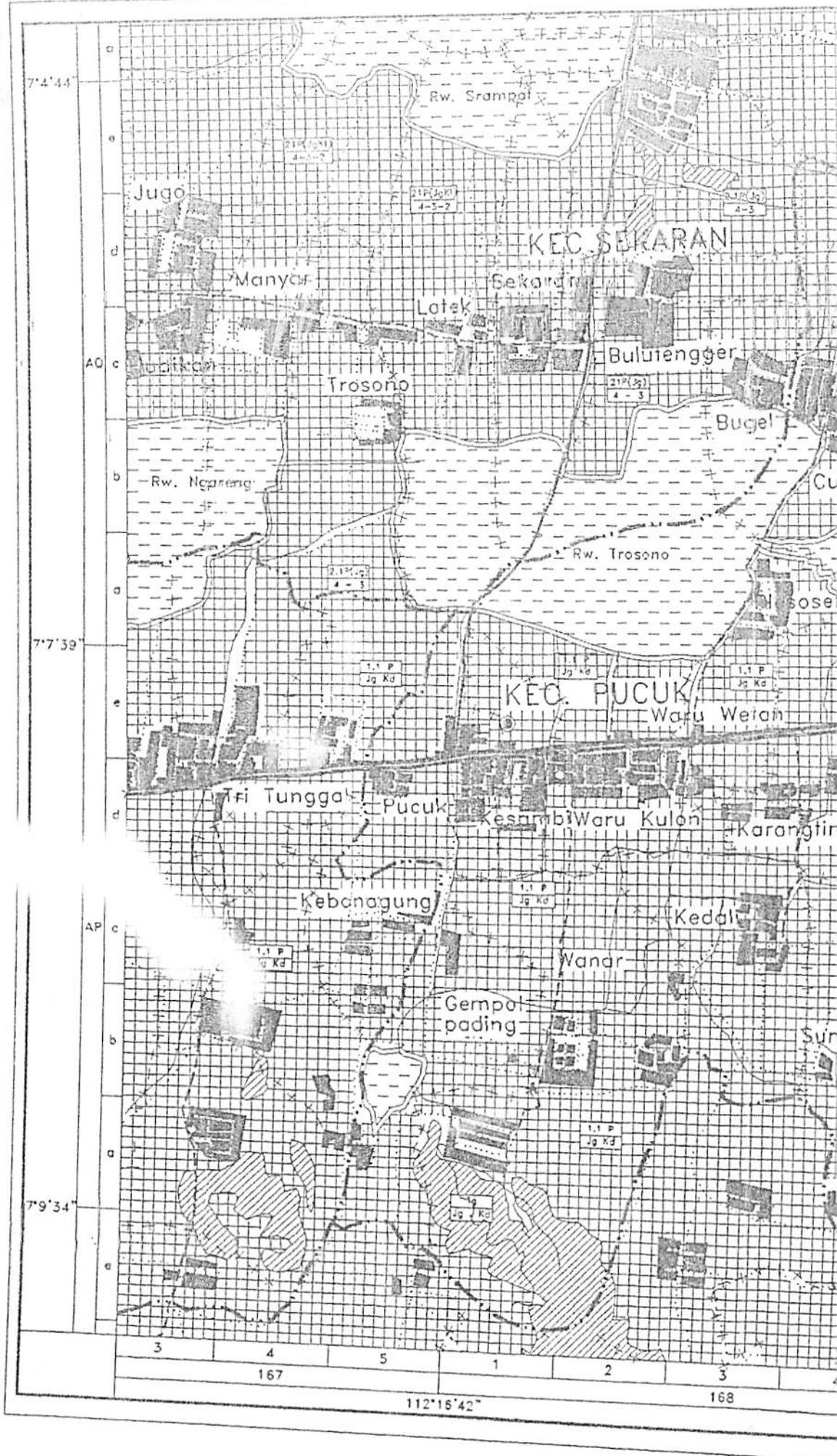
apalagi pada sisi selatan dari jalan arteri primer tersebut membentang dan membelah kota dari arah timur-barat, keterbatasan ini merupakan tantangan bagi Kota Pucuk untuk mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang tidak hanya bertumpu pada jaringan jalan arteri tersebut.

Untuk lebih jelasnya komposisi penggunaan lahan di Kota Pucuk dapat dilihat pada tabel: 2.3.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Desa Menurut Jenis Penggunaan Tanah
di Kota Pucuk Tahun 2000

Desa	Jenis Penggunaan Tanah					Jumlah
	Tanah Sawah	Tanah Kering	Hutan Rakyat	Bangunan /Pekarangan	Penggunaan Lainnya	
Pucuk	137.00	5.80	0.00	22.56	20.64	186.000
Kesambi	69.00	0.00	0.00	18.00	38.00	125.000
Warukulon	190.00	9.27	0.00	31.89	20.84	252.000
Waruwetan	69.00	4.00	0.00	16.00	13.00	102.000
Paji	99.00	2.22	0.00	31.00	43.23	175.454
Karangtinggil	90.00	3.00	0.00	17.00	10.00	120.000
Kedali	99.50	5.00	0.00	15.00	7.50	127.000
Tanggung	134.07	23.00	0.00	39.50	15.40	211.972
Sumberejo	44.79	32.00	0.00	37.00	43.70	157.489
Plosetro	42.75	2.00	0.00	17.00	9.43	71.183
Wanar	159.47	65.09	35.01	49.01	19.52	328.100
Kota Pucuk	1,134.58	151.38	35.01	293.96	241.26	1,856.198
Prosentase	61.12	8.16	1.89	15.84	13.00	100.00

Sumber : Data Kecamatan Dalam Angka



7°4'44"

7°7'39"

7°9'34"

AO

AP

3

167

5

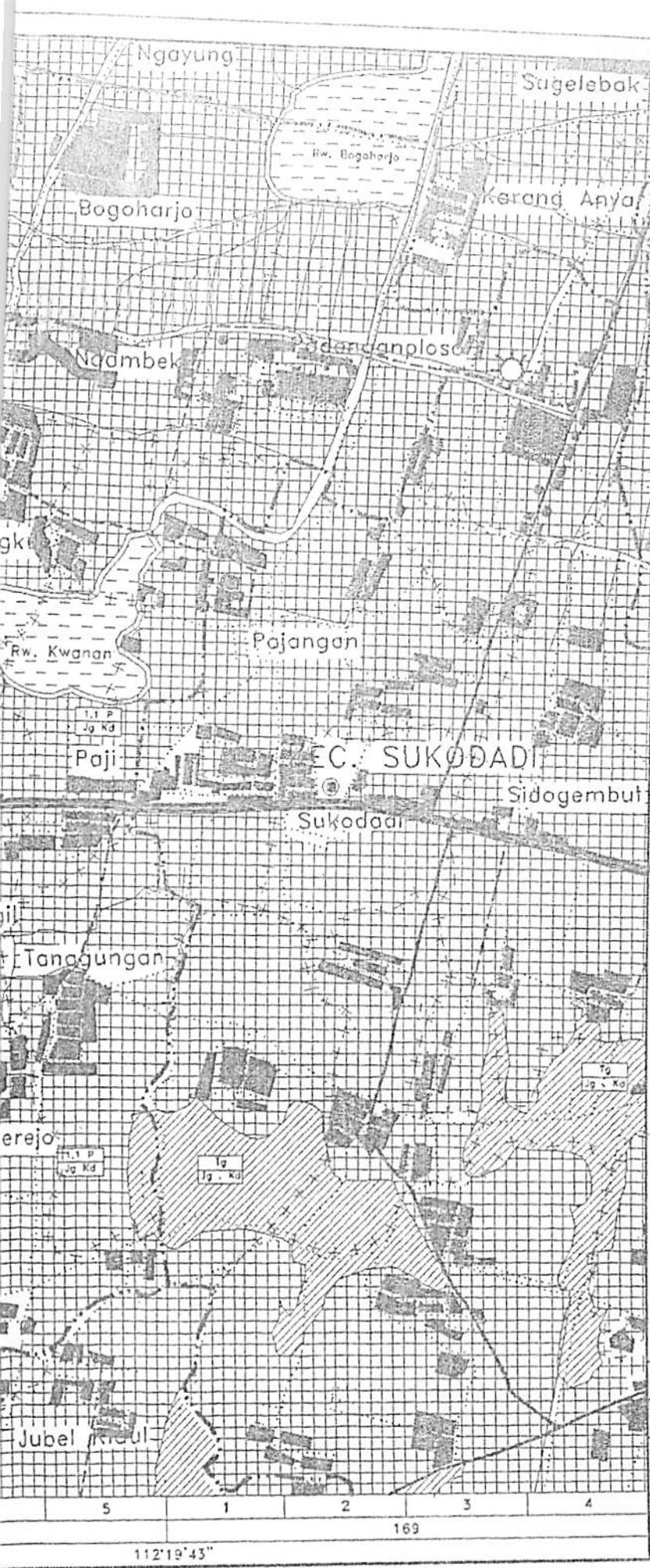
1

2

3

112°16'42"

168

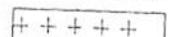
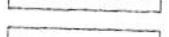
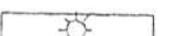
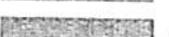


PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK PUCUK

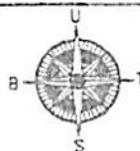
PETA
PENGUNAAN TANAH KOTA PUCUK

KETERANGAN:

-  BATAS KECAMATAN
-  BATAS DESA
-  JALAN ASPAL
-  JALAN BATU
-  JALAN TANAH
-  REL KA
-  SUNGAI
-  KANTOR KECAMATAN
-  KANTOR DESA
-  DANAU/RAWA
-  SUMBER/MATA AIR
-  LAHAN TERBANGUN
-  SAWAH
-  TEGALAN

SUMBER : PERTANAHAN KAB. LAMONGAN, HASIL SURVEY

NO. GAMBAR : 2.4



0 0.20 0.40 Km

112°19'43"

169

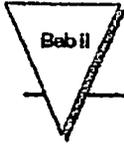
Fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kota Pucuk pada tahun 2000 meliputi 1 buah Puskesmas, 6 unit puskesmas pembantu, 59 posyandu dan didukung oleh 1 tempat praktek dokter, 13 paramedis, 14 bidan dan 27 dukun bersalin, juga terdapat 1 unit kantor pos pembantu dan kantor polisi.

Fasilitas peribadatan berupa masjid, langgar dan mushollah tersebar di pusat-pusat pemukiman dengan penyebarannya untuk seluruh wilayah kecamatan adalah: untuk mesjid terdapat 49 unit sedangkan untuk tingkat kota terdapat sebanyak 25 unit, untuk surau/langgar terdapat 183 unit. Sedangkan untuk fasilitas lainnya tidak tercatat.

2.6. Karakteristik Transportasi

Kota Pucuk dibentuk oleh jaringan jalan arteri primer, yang memanjang dari timur ke barat dan kolektor primer arah utara ke selatan, karena letak kota ini termasuk dalam koridor jalan arteri dan letaknya tidak jauh dari ibukota Kabupaten Lamongan, pada saat jam sibuk kadang-kadang ditemui keadaan yang mengganggu fungsi jaringan jalan arteri terutama di kawasan pertigaan ke arah utara, yang merupakan akses ke kawasan wisata pantura, selain itu fungsi jalur jalan arteri dan kolektor primer tersebut dipergunakan untuk lalu lintas campuran sehingga akan menambah sibuknya kawan tersebut.

Hubungan dengan wilayah belakangnya (hinterland) dilayani oleh jalan Kabupaten yang kondisinya saat ini memerlukan penanganan dengan segera, selain besarnya damija yang minimal (lebar 4 meter) serta kondisi penetrasi



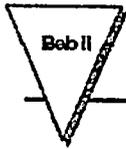
yang sudah memerlukan penanganan (terutama pada kawasan selatan). Pada kawasan utara mempunyai topografi yang landai dan terdapat beberapa kawasan rawa, pada saat musim penghujan kadang-kadang airnya sampai melimpah ke jalan.

Keadaan ini akan semakin memperparah kondisi jalan yang akan menuju ke dan dari wilayah Kota Pucuk pada kawasan utara, karena akan semakin mudah aspal akan terkelupas akibat tergerus air.

2.7. Permasalahan Wilayah Kota Pucuk

Permasalahan Kota Pucuk saat ini banyak dipengaruhi oleh kondisi topografis, tata guna lahan serta keberadaan jalur transportasi yang membelah kawasan perkotaan baik jalur arteri primer dan jalur KA.

- Terdapatnya jaringan jalan arteri yang membelah kawasan bagian utara dan selatan, sehingga pada kawasan utara dan selatan seakan terputus hubungan fungsional yang tidak saling mendukung antar kawasan.
- Demikian pula pada keberadaan jalur KA yang melintasi kawasan perkotaan sejajar dengan badan jalan arteri primer yang mengakibatkan hal yang serupa pada titik pertama.
- Kurangnya akses jaringan ke kawasan belakangnya terutama pada kawasan yang menjauhi jalur arteri baik pada kawasan utara dan selatan.
- Lokasi permukiman penduduk yang terkonsentrasi di sekitar kantor kecamatan dan cenderung mendekati fasilitas umum (pusat perdagangan



Kota Pucuk) dimana justru keberadaan fasilitas tersebut berada pada sisi yang berbatasan langsung dengan jalan arteri primer tanpa didukung oleh akses jalan penghubung lainnya.

- Kurangnya prasarana jalan kota (terutama jalan dan drainase), sehingga perkembangan kota tidak dapat menyebar ke semua arah dimana pada kawasan pusat kota mempunyai aksesibilitas yang tinggi dan kegiatan sosial ekonomi kota bercampur dengan permukiman sehingga akan dapat mempengaruhi fungsi jalan arteri primer.
- Terbatasnya kemampuan pengelolaan baik disegi perencanaan, pelaksanaan dan pengelola kota.
- Terbatasnya dana untuk pembangunan prasarana dan fasilitas kota yang mengakibatkan tingkat pelayanan terhadap warga kota relatif rendah.
- Terbatasnya prasarana utama di kawasan perkotaan sehingga masih banyak masyarakat yang berorientasi ke luar wilayah Kecamatan Pucuk serta minimnya lahan yang akan diperuntukkan bagi fasilitas umum.

Bab III



TINJAUAN
PROSES
PERENCANAAN
RUTRK/RDTRK KOTA PUCUK

BAB III

TINJAUAN PROSES PERENCANAAN

3.1. Kedudukan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk Dalam Perencanaan Kota

Sesuai dengan tujuan dan ketentuan teknis, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk merupakan usaha untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Selain itu rencana tersebut juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mencapai tujuan terciptanya lingkungan ekosistem yang lebih baik. Hal ini dicapai antara lain dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk, dengan sasaran, yaitu :

- Sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
- Mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan serta merupakan rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.
- Mampu berfungsi sebagai pusat dan sub pusat pengembangan kota dalam suatu sistem pengembangan wilayah sub regional dan regional.
- Mengoptimalkan pengembangan kawasan perkotaan secara tepat.

- Mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- Memisahkan aktivitas yang mengganggu dari kawasan yang dilindungi ataupun kawasan tertentu dengan dikelompokkan pada kawasan tertentu pula.
- Membatasi eksploitasi yang berlebihan disuatu kawasan budidaya dalam wilayah IKK Pucuk.
- Klasifikasi penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk menentukan spesifikasi dan tujuan dari setiap jenis rencana yang dihasilkan.

3.2. Dasar-Dasar Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987, terdapat 4 (empat) jenis Rencana Tata Ruang Kota yaitu :

- ♦ Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu rencana struktur ruang wilayah secara garis besar yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu wilayah dengan strategi pembangunan regional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan wilayah dengan wilayah pengembangan dalam rangka pengendalian program sektoral maupun wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah di gambarkan dalam peta berskala 1: 25.000.

2.4. Karakteristik Perekonomian

mata pencaharian penduduk Kota Pucuk sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh tani, jasa perbengkelan, pedagang dan bakul kecil serta karyawan/Pegawai Negeri. Fasilitas perdagangan di Kota Pucuk berupa Pasar Desa merupakan pasar yang hanya memiliki skala pelayanan lokal. Fasilitas perdagangan lainnya berupa warung-warung yang umumnya melayani kebutuhan pokok harian tersebar di setiap desa.

Struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian penduduk di Kota Pucuk berdasarkan atas sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Lamongan mulai tahun 1995 yang paling dominan terletak pada sektor pertanian, perdagangan, jasa dan sektor lainnya.

2.5. Fasilitas Pelayanan Kota

fasilitas pendidikan yang ada di Kota Pucuk antara lain TK dan SD/Ibtidaiyah, SLTP/Tsanawiyah sampai Pondok Pesantren bersifat pelayanan kota. Fasilitas pendidikan setingkat SD/MIS tersebar di setiap desa.

Untuk fasilitas SD Negeri tercatat 10 unit dari 20 unit yang terdapat pada tingkat Kecamatan, sedangkan untuk SMTP negeri tercatat 1 unit yang terletak di Desa Paji dan untuk SMTP swasta tercatat 4 unit. Pada fasilitas SMTA untuk SMTA Negeri tidak terdapat akan tetapi untuk fasilitas SMTA swasta tercatat 1 unit.

- ◆ Rencana Umum Tata Ruang Kota , yaitu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 : 10.000.
- ◆ Rencana Detail Tata Ruang Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota pada setiap kawasan. Rencana Detail Tata Ruang Kota di gambarkan dalam peta berskala 1 : 5.000.
- ◆ Rencana Teknik Ruang Kota, yaitu rencana geometris pemanfaatan ruang yang disusun untuk perwujudan ruang kota dalam rangka implementasi pembangunan kota. Rencana Teknik Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 : 1.000

Pada bagian berikut ini akan diterangkan mengenai dasar-dasar perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman yang mencakup pengertian dasar, tujuan dan sasaran perencanaan, prinsip dasar, serta ketentuan teknis perencanaan.

3.2.1. Pengertian Dasar

Perencanaan kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan rencana kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang

berwawasan lingkungan hidup, berasaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya dan dibawahnya serta merupakan pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya lestari, optimal, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rencana Umum Tata Ruang Kota mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan suatu strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan pula dengan pelaksanaan pembangunan lima tahun Daerah Propinsi dan Pembangunan lima tahun Nasional (Repelita).

Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan Rencana Tata Ruang yang mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota maupun rencana kegiatan sektoral lainnya.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan oleh instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Kabupaten, Swasta maupun Masyarakat.

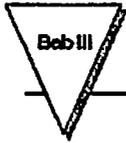
Pada prinsipnya Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang yang sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan.

3.2.2. Tujuan Dan Sasaran Perencanaan

A. Rencana Umum Tata Ruang Kota

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau IKK Pucuk sendiri, serta masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencana sektoral dan daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan diwilayah perencanaan. Selanjutnya Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun



harus mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk menetapkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah nasional dan daerah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dengan tujuan dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan pencapaian cita-cita tertinggi masyarakat kota yang bersangkutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

Mengingat bahwa perkembangan kota tidak hanya akan berakibat pada wilayah-wilayah di sekitar saja, tetapi juga wilayah regional yang lebih luas dan bahkan juga mempunyai dampak terhadap kepentingan nasional, maka penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota harus mempertimbangkan kepentingan Nasional, Regional dan Lokal sebagai berikut :

- Kepentingan Nasional, yaitu bahwa dalam rangka pembangunan wilayah, upaya pengembangan dan pembangunan kota diarahkan untuk mencapai adanya keseimbangan pertumbuhan antara kota-kota dan usaha peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kota.

- Kepentingan Regional, yaitu bahwa pengembangan kota diarahkan pada keseimbangan pertumbuhan kota dengan wilayah belakangnya. Selain itu kota harus mampu menyediakan fasilitas dan utilitas bagi kepentingan regional.
- Kepentingan Lokal, yaitu bahwa perencanaan kota bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan kota yang baik. Baik lingkungan kehidupan kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi penduduk dalam suasana yang menyenangkan.

B. Rencana Detail Tata Ruang Kota

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal yang menjadi tujuan dan sasarannya, yaitu:

- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota.
- Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada khususnya.
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.

- Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan

3.2.3. Prinsip Dasar

Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota pada prinsipnya harus mempertimbangkan tujuh prinsip pendekatan, yaitu :

1. Prinsip pendekatan politis, yang menyangkut upaya menyelaraskan pertumbuhan kota-kota sekaligus mencegah timbulnya kesenjangan antara kota-kota besar dengan kota-kota kecil.
2. Prinsip pendekatan ekonomi, yang menyangkut pada upaya efisiensi dan efektifikasi penggunaan potensi-potensi yang dimiliki kota.
3. Prinsip pendekatan sosial budaya, yang menyangkut upaya penciptaan suasana dan lingkungan kemasyarakatan dengan nilai-nilai sosial budaya yang harmonis berdasarkan kegotongroyongan.
4. Prinsip pendekatan Hankam, yang menyangkut pada penciptaan kondisi kota yang aman dan tertib untuk menunjang ketahanan nasional.
5. Prinsip pendekatan strategis, yang menyangkut penentuan fungsi kota, pengembangan keglatan kota dan tata ruang kota yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka panjang.
6. Prinsip pendekatan teknis, yang menyangkut upaya optimalisasi pemanfaatan ruang kota, antara lain dengan memperbaiki lingkungan,

meremajakan, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mengefisienkan pola angkutan, menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

7. Prinsip pendekatan pengelolaan, yang menyangkut aspek administrasi keuangan, hukum, dan perundang-undangan, agar rencana kota dapat diterapkan melalui koordinasi antara instansi vertikal di daerah dan dinas otonom dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.

Di dalam usaha penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota perlu dirumuskan kebijaksanaan pengembangan kota dengan mempertimbangkan azas manfaat, pemerataan, keseimbangan, dan pertumbuhan serta kelestarian sesuai dengan tingkat perkembangan kota itu sendiri maupun hubungan antara kota itu dengan daerah sekitarnya.

Suatu hal yang penting ialah bahwa kebijaksanaan dasar perencanaan harus dirumuskan berdasarkan tipe kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota serta pola kota itu sendiri. Dalam menetapkan wilayah perencanaan kota dapat dibedakan atas kota yang berstatus pemerintahan dan kota yang tidak berstatus pemerintahan. Bagi kota yang berstatus pemerintahan, maka wilayah perencanaan ditetapkan sama dengan luas wilayah administrasinya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kota yang tidak berstatus pemerintahan, ditetapkan wilayah perencanaan kotanya yang meliputi wilayah lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris dan diperkirakan dapat menampung

perkembangan hingga 10 tahun mendatang. Batas administrasi yang memuat batas wilayah kota tetap dijadikan pegangan sebagai basis data dan pengarahannya perencanaan tata ruangnya.

3.2.4. Ketentuan Teknis Perencanaan

Rencana Umum Tata Ruang Kota memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi, rencana sistem utama jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan pengembangan kota, mencakup penentuan tujuan pengembangan kota, fungsi, strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan bidang pembangunan, kependudukan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas.
2. Rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampai akhir tahun perencanaan. Pemanfaatan ruang kota hendaknya memperhatikan larangan penggunaan areal persawahan beririgasi teknis untuk kepentingan perkembangan kota sesuai dengan :



- a) Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 29 September 1994 Nomor : 5334/ MK/ 9/ 1994.
 - b) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Oktober 1994 Nomor : 460 – 3346.
 - c) Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 5 April 1995 Nomor : 611/ 604/ 201.2/ 1995.
 - d) Surat Edaran Bupati Kabupaten Lamongan tanggal 2 Juli 1996 Nomor : 591/ 904/ 401.014/ 1996.
3. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan didalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat-pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi pelayanan.
 4. Rencana sistem transportasi, memuat arahan garis besar tentang pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor baik fungsi primer maupun sekunder yang ada di dalam kota tersebut.
 5. Rencana sistem utilitas kota, memuat arahan utama tentang pola jaringan fungsi primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air kotor, air limbah di dalam kota.
 6. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, memuat arahan pengolahan pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk kepentingan pelayanan kota.

7. Indikasi unit pelayanan kota, merupakan arahan mengenai pembagian unit-unit pelayanan kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk.
8. Rencana pengelolaan pembangunan kota, memuat arahan tahapan pelaksanaan program pembangunan setiap lima tahunan selama 10 tahun, arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta arahan bagi pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Batas wilayah perencanaan yaitu :
 1. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai status pemerintahan seperti Kotamadya atau Kota Administratif, wilayah perencanaan adalah keseluruhan wilayah administrasi kota.
 2. Bagi kota-kota yang belum mempunyai status pemerintahan, ditetapkan menurut besaran tertentu, dengan berpedoman pada Penetapan Batas Wilayah kota Kabupaten Lamongan.
- b. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai Rencana Umum Tata Ruang Kota maka rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Rumusan rencana lebih merupakan Rencana Struktur pemanfaatan ruang.
- d. Bersifat strategis dan operasional.
- e. Secara internal mampu menjamin adanya konsistensi antara program pembangunan Sektoral atau Lintas Sektoral dengan program pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

Strategi dan kebijaksanaan Dasar pengembangan kota merupakan arahan terhadap :

a. Kebijakan pengembangan kota :

- 1. Penentuan fungsi kota.
- 2. Pengembangan sektor-sektor dan bidang-bidang pembangunan.
- 3. Intensifikasi dan atau ekstensifikasi pemanfaatan ruang.
- 4. Kependudukan, antara lain mobillitas, fertilitas dan mortalitas, serta distribusi penduduk pada akhir tahun perencanaan.
- 5. Pengembangan fasilitas dan utilitas.

b. Struktur pemanfaatan ruang kota :

- 1. penentuan persediaan ruang untuk setiap komponen kota
- 2. Penentuan intensitas penggunaan menurut fungsi, baik fungsi primer atau fungsi sekunder.
- 3. Hubungan antar fungsi-fungsi kegiatan yang ada dalam kota yang direncanakan sampai akhir tahun perencanaan dengan kedalaman sampai pada detail kawasan.

- c. Struktur utama tingkat pelayanan kota:
1. tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan kota
 2. pusat pelayanan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas dan lokasi.
- d. Sistem utama transportasi:
1. pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor, baik fungsi primer maupun sekunder
 2. Pola jaringan jalan raya, angkutan pelayaran baik laut, danau maupun angkutan penyeberangan.
- f. Sistem utama jaringan utilitas kota, terdiri atas air bersih, telepon, listrik, air kotor, air limbah, air limbah dan persampahan.
- g. Pengembangan pemanfaatan air baku, terdiri atas air permukaan, air tanah dalam, dan air tanah dangkal.
- h. Indikasi unit pelayanan seperti penentuan dan pembagian unit-unit pelayanan terhadap penduduk kota.
- i. Sistem pengelolaan pembangunan kota :
1. Penanganan lingkungan
 2. Sumber pembiayaan pembangunan
 3. Pengorganisasian aparatur pelaksana

Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan teknis perencanaan sebagai berikut :

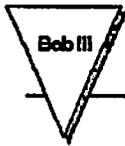
1. Jangka waktu RDTRK adalah sepuluh tahun dan sesuai dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota yang bersangkutan (dua PELITA).

2. Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup dan berlaku untuk seluruh wilayah kota tetapi jika dipandang perlu pihak Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi dan tingkat permasalahannya.
3. Penetapan struktur dan besarnya bagian wilayah kota harus mencerminkan intensitas penggunaannya yang dinilai dari segi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sesuai dengan fungsi penggunaannya.
4. Penetapan struktur bagian wilayah kota akan ditentukan oleh peranan pusat-pusat pelayanannya.
5. Tiap bagian wilayah kota yang direncanakan harus mampu mencerminkan satu kesatuan lingkungan permukiman atau lingkungan kegiatan kota yang serasi dengan sarana dan prasarana yang direncanakan/ditetapkan.
6. RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota.
7. Rumusan rencana sudah merupakan penyiapan ruang dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota yang baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.
8. Rumusan rencana di atas bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis sudah menjadi kebijaksanaan lebih konkrit tentang :

- a) Pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan.
- b) Pemanfaatan ruang ditinjau besarannya setiap blok peruntukan materinya sekurang-kurangnya mengatur pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan/kios, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai dari STK sampai PT, puskesmas dan rumah sakit, rumah ibadah, taman rekreasi dan lapangan olahraga, perkantoran dan perumahan, sub terminal, pertanian, perikanan, pemakaman dan kawasan khusus lainnya.
- c) Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata jenjang, kapasitas dan intensitas antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur perdagangan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan rekreasi.
- d) Sistem fungsi jaringan jalan dalam hal penentuan lokasi dan besaran tiap fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder.
- e) Sistem jaringan utilitas dalam penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier pada jaringan air bersih, telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah, air limbah, dan air hujan.
- f) Kepadatan bangunan dalam hal perbandingan antara keseluruhan luas lahan tertutup dengan luas bangunan setiap blok peruntukan, materinya sekurang-kurangnya akan mengatur koefisien dasar bangunan dengan

klasifikasi sangat tinggi (>75%), tinggi (>50% - 75%), menengah (>20% - 50%), rendah (>5% - 20%) dan sangat rendah (<5%).

- g) Penentuan ketinggian bangunan, maksimum dan minimum pada setiap blok peruntukan.
- h) Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalan bagi lahan yang boleh atau tidak boleh ada bangunan di atasnya pada setiap blok peruntukan materinya sekurang-kurangnya akan mengatur jarak antara as jalan dengan pagar halaman dan bangunan/rumah baik pada sisi muka, samping, dan belakang. Ketentuan detail mengikuti PP 26/ 1985.
- i) Penetapan luas petak bangunan yang terdapat pada setiap blok peruntukan, dimana materinya sekurang-kurangnya akan mengatur klasifikasi luas perpetakan sebagai berikut ;
 - Klasifikasi I, >2500 m²
 - Klasifikasi II, >1000 m² – 2500 m²
 - Klasifikasi III, >600 m² – 1000 m²
 - Klasifikasi IV, >250 m² – 600 m²
 - Klasifikasi V, >100 m² – 250 m²
 - Klasifikasi VI, >50 M² – 100 M²
- j) Indikasi unit pelayanan dalam hal fasilitas umum kota yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada setiap blok peruntukan.



- k) Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam hal pengendalian peruntukan, pelaksanaan program/proyek dari prasarana dan sarana kota dalam kurun waktu lima tahun yang dibagi dalam tiga tahunan.
- l) Pengelolaan/penanganan lingkungan dalam hal peningkatan, perbalkan, pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali pada tingkat wilayah kecamatan.

3.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Konsepsi yang mendasari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk ini secara teoritis bertitik tolak dari konsep yang telah dijalankan dengan penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan yang tengah berlangsung.

Dari konsep awal yang telah dikembangkan serta melihat potensi dan kendala pengembangan wilayah yang saat ini terus berkembang baik secara fisik dan perubahan dari aspek sosio ekonomi masyarakat akan dapat disimpulkan arahan pengembangan pada masa yang akan datang. Sehingga arah pengembangan kota seiring dengan apa yang telah dijadikan sebagai target serta sasaran dalam pengembangan wilayah Kota Pucuk, Dengan keadaan ini diharapkan akan mengurangi dampak ataupun simpangan yang besar terhadap struktur wilayah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan

kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk, perlu adanya upaya-upaya pendekatan seperti upaya pendekatan secara spasial, pendekatan sektoral dan pendekatan terhadap aspek institusi/kelembagaan

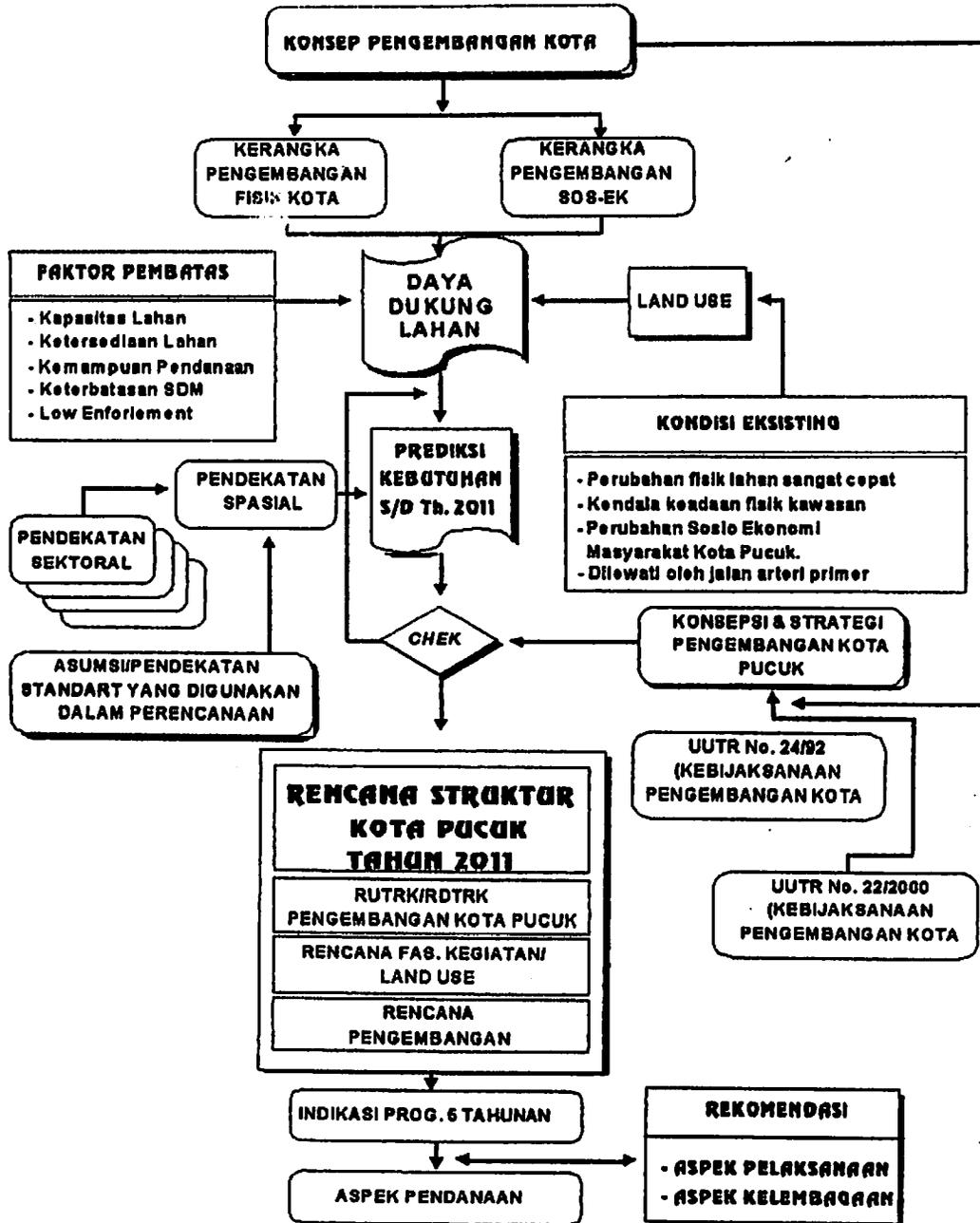
3.3.1. Pendekatan Spasial

Dalam penetapan Rencana Struktur Ibu Kota Kecamatan Pucuk 10 tahun mendatang, tercermin pada rencana spasial yang dalam penetapannya mempunyai pendekatan tersendiri yang pada prinsipnya akan mencakup beberapa aspek pendekatan sebagai berikut:

- Kondisi eksisting land use serta rencana yang lebih detail.
- Kemampuan dan daya dukung lahan yang dikaitkan dengan berbagai faktor pembatas.
- Berbagai asumsi serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk prediksi kebutuhan dimasa yang akan datang.

Keseluruhan pendekatan tersebut yang dikaitkan dengan standart perencanaan yang ada serta pendekatan sektoral dari berbagai aspek pengembangan dalam pembangunan fisik kota (perumahan, jalan kota, fasilitas umum, utilitas kota, dan lainnya) dijadikan dasar dalam penetapan serta prediksi kebutuhan lahan kota yang seterusnya digunakan dalam rencana peruntukan lahan (land use) yang merupakan salah satu hal terpenting yang harus ditetapkan dalam rencana struktur IKK Pucuk Tahun 2011.

Bagan: 3.1.
Kerangka Penyusunan RUTRK/RDTRK Kota Pucuk Tahun 2011



3.3.2. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral perlu dilakukan untuk mendukung policy/ kebijaksanaan spasial yang antara lain berupa arahan dan pengembangan land use dari berbagai sektor pengembangan kota, antara lain: sektor transport, sektor kegiatan perekonomian, sektor perdagangan dan lain-lain.

Langkah-langkah pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing sektor dalam suatu perencanaan tata ruang mempunyai metode yang berbeda-beda, namun sasaran yang dituju mempunyai kesamaan berupa "Pendekatan Spasial", yaitu cara-cara memprediksi kebutuhan pengembangan dari berbagai sektor kegiatan (perumahan, perdagangan, fasilitas umum, utilitas kota) yang keseluruhan dimanivestasikan dalam kebutuhan ruang bagi setiap sektor yang dianalisis untuk seterusnya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana struktur ruang Kota Pucuk tahun 2011. Untuk memperoleh gambaran secara rinci pendekatan dari masing-masing sektor pada seluruh pendekatan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk ini, maka dapat dilihat pada sub bab berikut:

3.3.2.1. Sektor Ekonomi Perkotaan

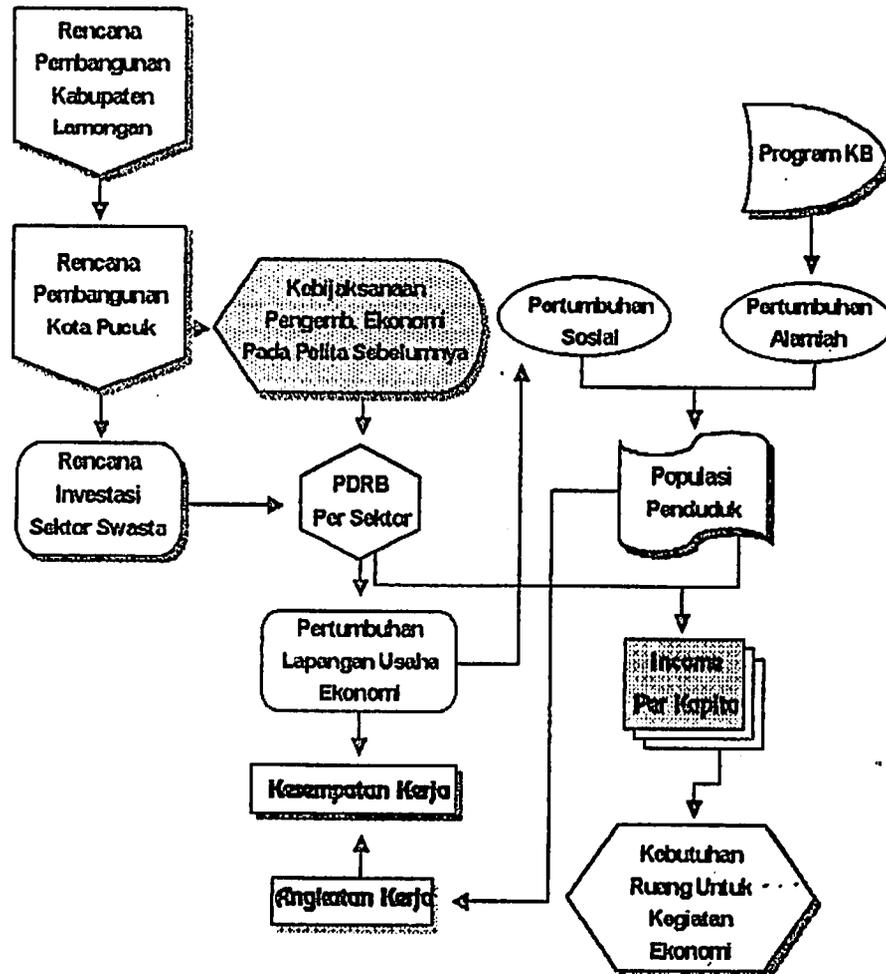
Analisis sektor ekonomi perkotaan merupakan analisis penting guna mendukung analisis sektor lain dalam menetapkan rencana spasial/struktur Ibukota Kecamatan Pucuk dimasa yang akan datang. Berbagai output dari analisis ekonomi ini, antara lain; tingkat pertumbuhan ekonomi Ibukota

Kecamatan Pucuk, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi penduduk, prediksi kesempatan kerja, dan lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat analisis serta prediksi kebutuhan ruang dari berbagai sektor lain seperti; sektor perumahan, sektor jasa dan perkantoran, dan lainnya. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis income perkapita dan kesempatan kerja penduduk di Ibukota Kecamatan Pucuk secara makro antara lain dapat dikaji melalui:

1. Analisis per sektor pendapatan yang dikaitkan dengan kebijaksanaan pengembangan ekonomi Daerah, serta prediksi Rencana Investasi sektor swasta dapat diprediksikan besarnya Pendapatan Kotor (Gross Regional Product) dari masing-masing sektor (Primer, Sekunder dan Tersier).
2. Analisis populasi penduduk, dikaitkan dengan pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) dan pertumbuhan sosial (pertumbuhan penduduk yang ditimbulkan oleh aktifitas non alamiah, seperti; daya tarik pekerjaan, daya tarik lingkungan perkotaan, dll) dapat diprediksikan besarnya populasi, angkatan kerja dan kesempatan kerja sesuai dengan tahun rencana.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua pendekatan tersebut (lihat Bagan:3.2 Kerangka Pemikiran Pendekatan Analisis Sosial Ekonomi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk 2011) juga akan dikeluarkan berbagai out put lain sesuai dengan kepentingan yang mendukung analisis sektor lain, terutama dalam prediksi kebutuhan ruang (lahan) pengembangan yang diperlukan sampai tahun 2011.

Bagan:3.2.
Kerangka Pemikiran Pendekatan Analisis Sosek
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota IKK Pucuk 2011



3.3.2.2. Sektor Perumahan

Sebagai salah satu aspek yang mendukung penyusunan rencana struktur kota, maka pendekatan sektor perumahan yang sasaran akhirnya tercermin dari jumlah kebutuhan rumah dan lahan pengembangan perumahan sampai tahun 2011, dilakukan dengan menganalisis 2 (dua) skenario yang

dijadikan asumsi dasar dalam menetapkan jumlah penduduk yang akan mendiami kawasan perumahan baru (KPB), yaitu memprediksikan besarnya:

1. Penduduk yang pindah dari kawasan permukiman lama (KPL) ke kawasan permukiman baru dari tahun 1995 hingga tahun 2010.
2. Arus masuk penduduk ke kawasan permukiman baru, yang berasal dari luar kawasan permukiman lama, antara lain; dari kawasan sekitar Pucuk dan dari luar kota dalam satu Kabupaten maupun diluar Kabupaten Lamongan.

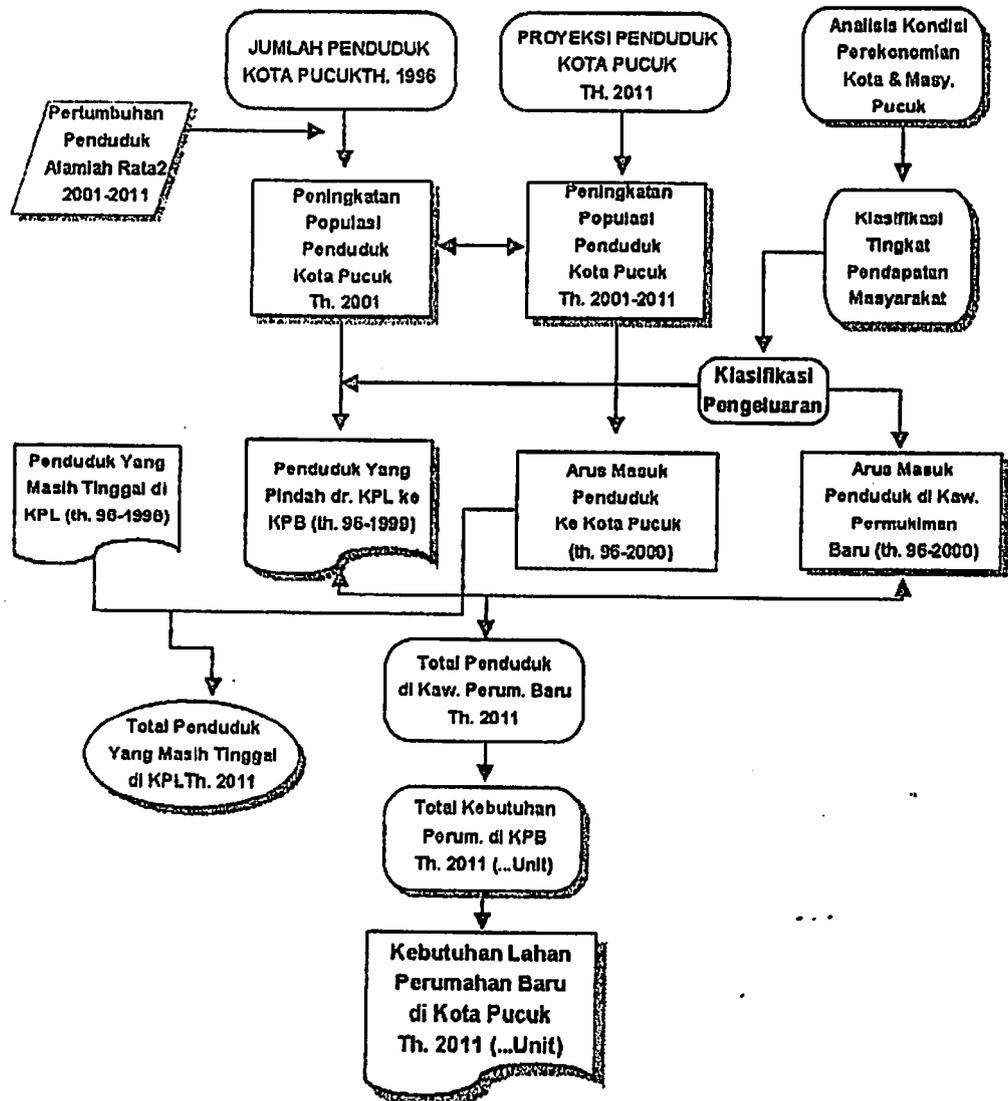
Kondisi kedua asumsi dasar tersebut (lihat Bagan: 03 Alur Pemikiran Penetapan Kebutuhan Lahan Perumahan), sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan ketepatan setiap besaran dari prediksi yang akan ditetapkan. Berbagai faktor tersebut antara lain:

- Kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi di IKK Pucuk, akan menjadi daya tarik penduduk untuk masuk ke Ibukota Kecamatan Pucuk (in migration).
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.
- Kondisi yang timbul secara mendadak: penduduk yang terkena pembebasan tanah/mempunyai kemampuan tinggi untuk memiliki rumah.
- Faktor kondisi perekonomian regional (makro) yang menentukan besar kecilnya kecenderungan pembangunan perumahan.

Dalam analisis berbagai faktor tersebut akan dikaji sebagai masukan dalam penetapan total penduduk yang membutuhkan lahan permukiman.

Bagan: 3.3.

Alur Pemikiran Penetapan Kebutuhan Lahan Perumahan



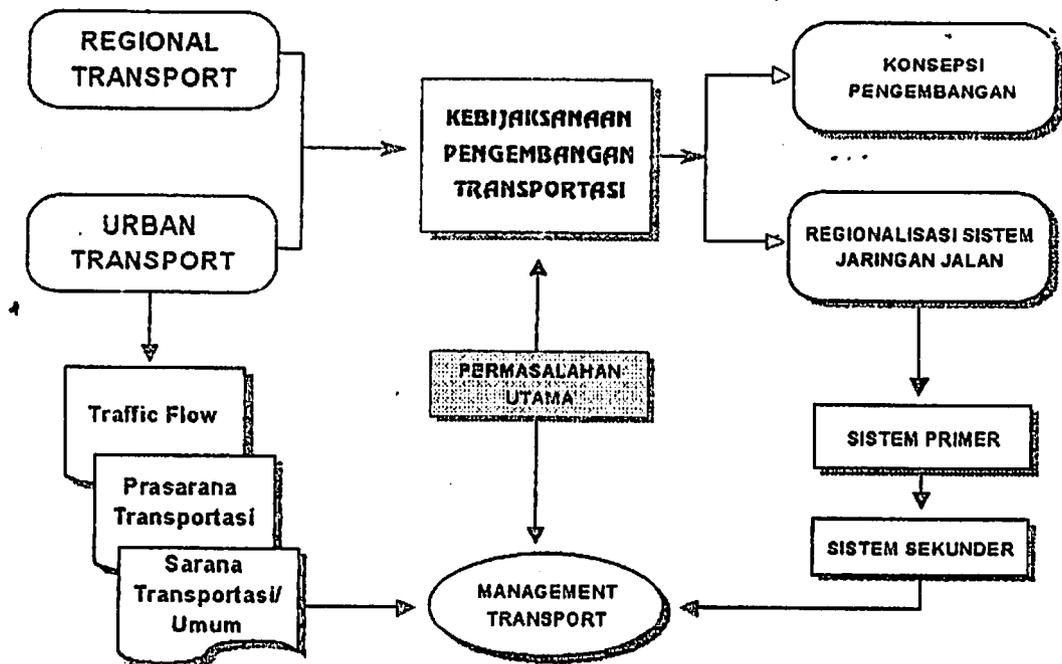
3.2.2.3. Sektor Jalan Kota

Titik berat pengkajian masalah transportasi di Kota Pucuk akan mengarah pada usaha-usaha mengurangi titik-titik genangan baru dengan kondisi lahan yang berada dibawah permukaan air laut, karena hal ini yang merupakan pemicu utama tidak berfungsinya secara maksimal badan jalan

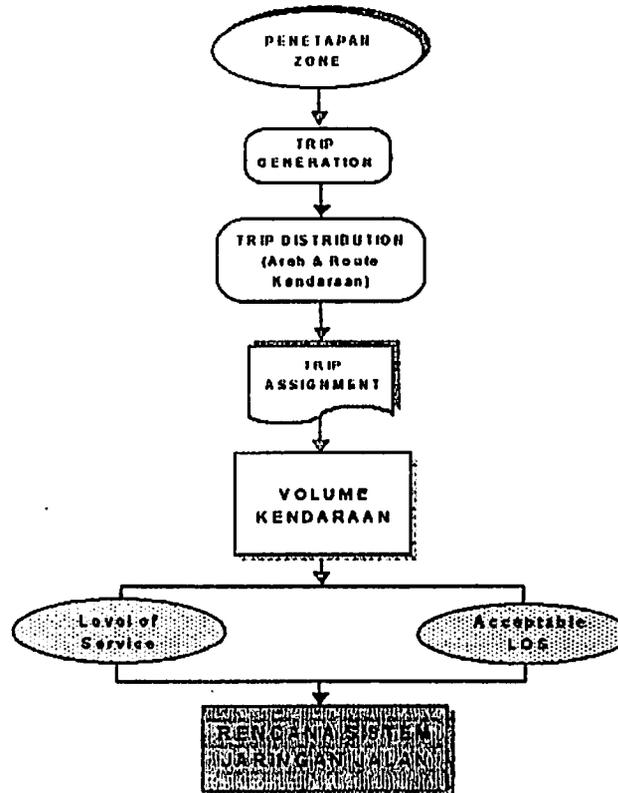
yang ada dan mengakibatkan pendeknya umur pemeliharannya ditambah dengan kondisi lahan yang labil. Selain itu disesuaikan dengan berkembangnya peruntukan lahan serta aktifitasnya di Kota Pucuk hingga tahun 2011.

Keluaran (out put) yang harus dicapai dalam rencana pengembangan ini adalah penetapan kapasitas jaringan jalan dari setiap jaringan jalan yang ada saat ini, kemudian diprediksikan kemungkinan usulan reorganisasi pola dan struktur jaringannya dikaitkan dengan rencana Land Use pada tahun 2010 mendatang. Kerangka pemikiran transport dalam perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk Tahun 2011 dapat dilihat pada Bagan: 3.4, sedangkan tahapan dan urutan dalam perencanaan sistem jaringan jalan dapat dilihat pada Bagan: 3.5.

Bagan: 3.4.
Kerangka Umum Perencanaan Transportasi



Bagan: 3.5. Tahapan Dalam Perencanaan Sistem Jaringan Jalan



3.3.2.4. Sektor Utilitas

A. Air Bersih

Air bersih yang didistribusikan ke suatu kota haruslah memenuhi kebutuhan (demand) penduduk maupun fasilitas yang ada di kota. Kebutuhan ini haruslah sesuai dengan kondisi kota pada saat itu maupun pada masa yang akan datang. Untuk itu perlu dilakukan tabulasi data yang relevan dengan perencanaan air bersih guna memproyeksikan kebutuhan air tersebut pada masa yang akan datang, agar tidak terjadi over-design maupun under-design, segala kriteria perencanaan, standart yang berlaku maupun peraturan yang ada, haruslah diperhatikan. Kondisi sistem air bersih yang

sudah ada haruslah direview kembali guna mendapatkan perencanaan yang optimal. Setelah diperoleh perhitungan volume air yang diperlukan, alternatif sumber air bersih haruslah didapatkan. Sumber air ini haruslah memenuhi syarat kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Kualitas air baku sangat menentukan jenis pengolahan air yang harus disediakan. Sedangkan kuantitas air yang diolah besar kecilnya sangat ditentukan oleh jenis kegiatan lahan kota (land use) yang ada. Air olahan yang telah memenuhi standart yang berlaku kemudian didistribusikan kepada pelanggan.

Secara diagramatis kerangka berfikir dalam perencanaan penyediaan air bersih dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk dapat dilihat pada Bagan: 3.6

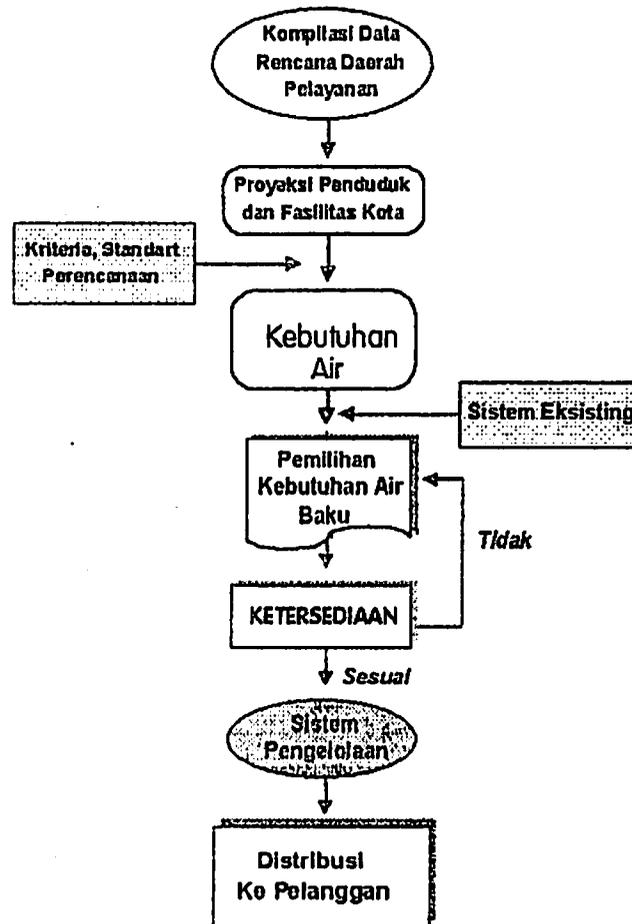
B. Sampah

Pada dasarnya pengelolaan sampah adalah cukup sederhana yaitu bahwa penumpukan sampah yang terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkut selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Agar sampah mencapai TPA, setidaknya ada tahapan yang harus dilalui:

1. Collection (Pengumpulan)
2. Haulage (Pengangkutan)
3. Disposal (Pembuangan)

Sumber sampah ada bermacam-macam, diantaranya: rumah tangga, pasar, rumah sakit, jalan dan taman, industri dan masih banyak lagi lainnya.

Bagan: 3.6.
 Kerangka Pemikiran Perencanaan Pengadaan Air Bersih
 Kota Pucuk Tahun 2011

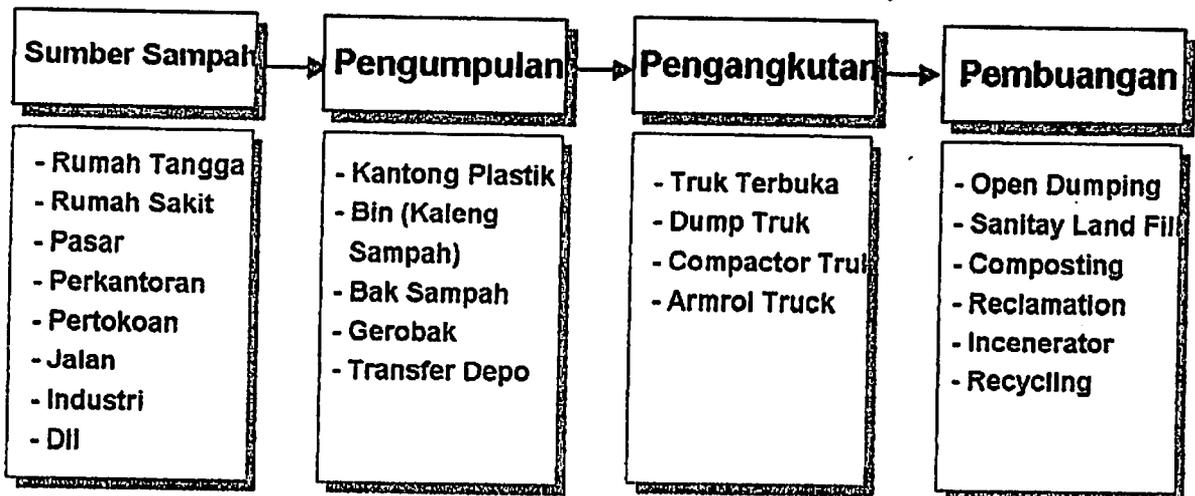


Agar pengangkutannya mudah, sampah harus dikumpulkan diberbagai tempat atau wadah seperti; kantong plastik, bak sampah, gerobak dan lainnya. Dari tempat pengumpulan ini kemudian sampah diangkut ke TPA oleh fasilitas pengangkut sampah seperti; truck bak terbuka, dump truck, compactor truck dan arm-roll truck. TPA dapat berupa open dumping, sanitary landfill, composting, reclamation, recycling dan lain sebagainya.

C. Air Limbah

Penanganan air limbah diawali dengan identifikasi kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan identifikasi ini maka air limbah dapat diklasifikasikan kedalam 2 kelompok utama yaitu: Air limbah domestik (rumah tangga) dan Air limbah industri. Kondisi di Kota Pucuk tidak terdapat industri yang menimbulkan pencemaran dalam skala besar maka dalam pembahasan ini dikhususkan pada timbulan air limbah domestik berasal dari kamar mandi, WC, bekas cucian, dapur dan sebagainya. Berdasarkan lokasi pengolahannya maka baik limbah domestik dapat diolah on-site maupun off-site. Untuk mengantarkan limbah ke lokasi pengolahan akhir dibutuhkan jaringan pipa air limbah (riol) yang bisa bersistem konvensional dan sistem lainnya.

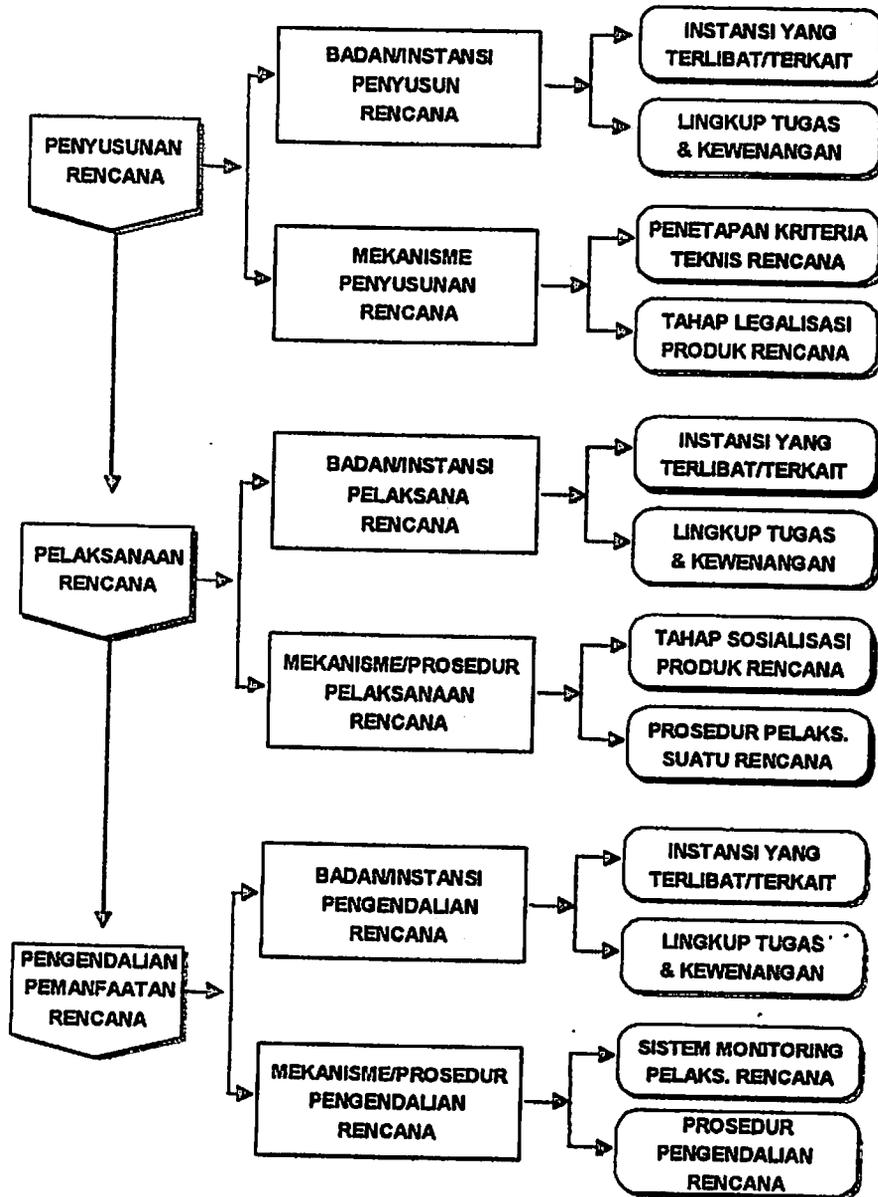
Bagan: 3.7.
Gambaran Umum Sistem Penanganan Sampah



3.3.3. Pendekatan Aspek Institusi/Kelembagaan

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapan suatu rencana adalah lemahnya aspek kelembagaan yang menyusun, melaksanakan dan mengawasi rencana itu sendiri. Apabila ditelusuri lebih lanjut maka ada dua hal yang dapat dikaji yaitu; kejelasan badan/institusi penyusun, pengelola dan pengawasan serta kejelasan mekanisme/prosedur dari setiap proses terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan rencana. Secara diagramatis beberapa permasalahan aspek kelembagaan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan beberapa point pokok (pointers) yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menelaah aspek kelembagaan (lihat Bagan: 3.8 Analisis Aspek Kelembagaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk)

Bagan: 3.8.
Analisis Aspek Kelembagaan RUTRK/RDTRK Kota Pucuk



Bab IV

SISTEMATIKA
PENJADWALAN
DAN PELAPORAN
RUTRK/RDTRK KOTA PUCUK

BAB IV

SISTEMATIKA PENJADWALAN DAN PELAPORAN

4.1. Tahapan Teknis Pekerjaan

Secara teknis, pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini berpedoman pada kerangka acuan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Adapun sistematisasi dari pekerjaan penyusunannya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Langkah kegiatan persiapan/Survey
2. Langkah kegiatan penyusunan Laporan Pendahuluan
3. Langkah kegiatan Kompilasi Data
4. Langkah kegiatan Analisa Data
5. Langkah kegiatan penyusunan Rancangan Rencana
6. Langkah kegiatan penyusunan Rencana

4.1.1. Tahap Persiapan Survey

Pokok-pokok pekerjaan yang dilakukan pada langkah kegiatan persiapan beserta produknya adalah sebagai berikut :

a. Persiapan dasar, berupa telaah studi yang pernah dilakukan sebagai bahan untuk merumuskan postulat, asumsi, dan hipotesa mengenai kota yang direncanakan, yang antara lain bersumber dari :

- ❖ Kebijakan Pembangunan Propinsi Jawa Timur
- ❖ Pola Dasar Pembangunan
- ❖ Pola Umum Repelita
- ❖ Rencana Umum Tata Ruang SWP
- ❖ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Aspek yang dikaji paling tidak akan terkait pada masalah-masalah :

- ❖ Struktur wilayah pengembangan, untuk mendapatkan arahan terhadap besaran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan.
- ❖ Kedudukan kota direncanakan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.
- ❖ Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, pengarahan besaran dan fungsi kota dalam skala pengembangan wilayah.

b. Persiapan teknik survey, berupa :

- ❖ Penyiapan peta-peta besar.

- ❖ Kerangka studi sebagai usulan teknis survey.
 - ❖ Penyiapan program kerja survey lapangan.
 - ❖ Penyiapan daftar data dan pertanyaan antara lain mengenai
 - ❖ Keadaan regional, kota, desa, dan obyek-obyek khusus yang strategis.
 - ❖ Persiapan administrasi dan pengurusan surat ijin survey.
- c. Penyusunan Laporan pendahuluan, yang berintikan :
- ❖ Latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup studi.
 - ❖ Prinsip-prinsip rencana umum tata ruang kota.
 - ❖ Prinsip-prinsip rencana detail tata ruang kota.
 - ❖ Metodologi pendekatan studi.
 - ❖ Metodologi teknik analisa.
 - ❖ Jadwal penyelesaian.
 - ❖ Sistematika laporan kemajuan pekerjaan.
 - ❖ Struktur organisasi pelaksana pekerjaan.
 - ❖ Komposisi tenaga ahli.

4.1.2. Tahap Kegiatan Survey

Pokok-pokok pekerjaan pada langkah kegiatan survey beserta produk yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. survey data instansional, berupa pengumpulan dan perekaman data dari instansi yang terkait dengan perencanaan kota. Hasilnya adalah uraian keadaan dan informasi baik dalam bentuk data angka atau peta, mengenai keadaan regional dan kota secara keseluruhan.
- b. Survey lapangan, dimaksudkan untuk menguji kebenaran fakta dari survey instansional dan untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya. Hasilnya berupa data angka maupun peta. Untuk lingkup regional, data yang dipetakan letak instalasi vital, pusat permukiman, dan potensi lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Untuk lingkup lokal, data yang dipetakan antara lain penggunaan/pemanfaatan lahan, kondisi bangunan/lingkungan, kondisi jalan, dan sanitasi serta harga/nilai tanah.

4.1.3. Tahap Kegiatan Kompilasi Data

Pokok-pokok pekerjaan pada kegiatan kompilasi data sebagai berikut :

- a. Mentabulasi dan mensistematiskan data berupa fakta dan informasi sesuai keperluan, sehingga mudah dibaca dan dimengerti serta siap untuk dianalisa.
- b. Menyusun data dan informasi sesuai dengan pokok bahasannya
 1. Regional (makro) mencakup :
 - a. Aspek kebijaksanaan pembangunan yang berkaitan dan berpengaruh pada perkembangan kota yang direncanakan, antara lain :

- ❖ Kebijakan Nasional
 - ❖ Kebijakan Pembangunan Kabupaten
 - ❖ Kebijakan Sektora¹
" "
- b. Aspek kependudukan, antara lain :
- ❖ Jumlah penduduk
 - ❖ Penyebaran penduduk
 - ❖ Pertumbuhan penduduk
 - ❖ Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan.
- c. Aspek perekonomian, antara lain :
- ❖ Sektor-sektor kegiatan ekonomi
 - ❖ Produksi tiap sektor kegiatan ekonomi
 - ❖ Penyebaran tiap sektor kegiatan ekonomi
 - ❖ Perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi
 - ❖ Pola aliran barang dan jasa dalam proses koleksi dan distribusi
- d. aspek sumber daya alam, antara lain :
- ❖ Keadaan tanah, air, dan iklim
 - ❖ Keadaan vegetasi dan fauna
 - ❖ Sumber daya alam yang belum diolah

- e. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas
 - ❖ Jenis fasilitas dan utilitas
 - ❖ Jumlah fasilitas dan besaran utilitas
 - ❖ Penyebaran fasilitas
 - ❖ Perkembangan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan penyebarannya
- 2. Lokal (mikro kota), mencakup :
 - a. Aspek kependudukan, antara lain :
 - ❖ Jumlah penduduk pada tiap desa .
 - ❖ Penyebaran penduduk tiap desa.
 - ❖ Perkembangan penduduk, jumlah, penyebaran dan komposisi.
 - ❖ Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan.
 - b. Aspek perekonomian, antara lain sektor-sektor kegiatan ekonomi kota perkembangan keadaan perekonomian dalam hal besarnya produksi dan tingkat pertumbuhannya
 - c. Aspek fisik dasar, antara lain :
 - ❖ Keadaan iklim
 - ❖ Keadaan Topografi
 - ❖ Keadaan geologi dan struktur tanah

- ❖ Keadaan hidrologi
- d. Aspek tata guna lahan, antara lain :
- ❖ Jenis penggunaan lahan
 - ❖ Luas penggunaan lahan yang secara umum dirinci menurut jenis-jenis penggunaan seperti perumahan, pemerintahan dan bangunan umum, perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau, ruang terbuka, transportasi, serta penggunaan khusus lainnya.
 - ❖ Intensitas penggunaan lahan yang dicirikan oleh indikator koefisien dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan
- e. Aspek pertanahan
- ❖ Harga dasar tanah
 - ❖ Status kepemilikan tanah
- f. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas, yaitu
- ❖ Jenis fasilitas dan utilitas
 - ❖ Jumlah fasilitas dan besaran utilitas
 - ❖ Penyebaran fasilitas
 - ❖ Perkembangan mengenai pengadaan fasilitas dan utilitas baik dalam kuantitas maupun kualitasnya

g. Aspek administrasi/pengelolaan pembangunan kota

- ❖ Struktur organisasi aparatur pelaksana pembangunan
- ❖ Struktur organisasi aparatur pelaksana pembangunan kota, tata kerja, dan personalia
- ❖ Keadaan keuangan daerah, mengenai volume anggaran (APBD-PAD) bantuan dari Propinsi dan Pusat, pajak dan retribusi ditinjau menurut sumbernya beserta perkembangannya
- ❖ Peraturan-peraturan daerah atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya tentang pelaksanaan pembangunan kota

4.1.5. Tahap Kegiatan Analisa

Kegiatan analisa merupakan kegiatan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, pendekatan, dan metoda serta teknik analisis perencanaan kota yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara praktis. Dalam kegiatan ini, pokok-pokok pekerjaan beserta produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

a. Pada prinsipnya secara keseluruhan terdapat 4 jenis penilaian utama yaitu :

- ❖ Analisa keadaan dasar yaitu menilai kondisi setiap komponen perkotaan dan wilayah pada saat sekarang.

- ❖ Analisa kecenderungan perkembangan, menilai kecenderungan perkembangan setiap komponen perkotaan yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperoleh gambaran masa depan kota yang direncanakan beserta sistem dan pola pelayanannya.
 - ❖ Analisa kebutuhan ruang, yaitu memperkirakan kebutuhan ruang yang diperlukan bagi proses perkembangan kota.
 - ❖ Analisa kemampuan dan pengelolaan pembangunan kota, yaitu menilai kondisi keuangan daerah, organisasi pelaksana, dan pengawasan pembangunan, dan personalia, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan untuk masa mendatang.
- b. Secara spasial terdapat 2 (dua) hal pokok sebagai obyek analisa yaitu :
1. *Analisa Lingkup Regional*, meliputi :
 - a. Analisa kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota antara lain:
 - ❖ Potensi hinterland dan permasalahannya, sehingga terdapat gambaran hubungan antara kota dengan wilayah belakangnya.
 - ❖ Pengaruh potensi dan permasalahan tersebut terhadap perkembangan sektor-sektor kegiatan di kota yang direncanakan, baik sekarang maupun dimasa depan, sehingga terdapat gambaran hubungan atau ketergantungan antar sektor.

- b. Kedudukan kota dalam perimbangan dengan daerah belakangnya;
 - ❖ Fungsi dan kedudukan kota dalam sistem perwilayahan yang ada.
 - ❖ Perkembangan sektor-sektor kegiatan kota dan pengaruhnya terhadap sistem perwilayahan, sekarang dan masa mendatang.
- c. Analisa pengaruh kebijaksanaan sektoral dan regional, antara lain:
 - ❖ Pengaruh kebijaksanaan terhadap sistem perwilayahan.
 - ❖ Pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor kegiatan.

2. *Analisa Lingkup Kota*, meliputi :

- a. Analisa kependudukan, antara lain menilai
 - ❖ Kecenderungan pertumbuhan (alamiah dan migrasi).
 - ❖ Kecenderungan penyebaran
 - ❖ Perkiraan dimasa depan mengenai jumlah dan komposisinya.
- b. Analisa perekonomian, antara lain menilai
 - ❖ Kecenderungan perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi
 - ❖ Perkiraan keadaan dimasa depan
- c. Analisa bentuk dan struktur kota, antara lain menilai;
 - ❖ Kemampuan dan kesesuaian lahan khususnya dalam kemampuan menerima kegiatan pembangunan.
 - ❖ Pola keruangan dan pemusatan kegiatan fungsional perkotaan.

- ❖ Keadaan tata guna lahan, yang diarahkan untuk dapat menggambarkan kecenderungan lokasi berbagai kegiatan.
- d. Analisa keadaan fasilitas pelayanan dan utilitas, antara lain menilai :
- ❖ Perkiraan kebutuhan fasilitas dan utilitas, baik dalam hal jumlah maupun besaran penyediaannya.
 - ❖ Perkiraan kebutuhan ruang dimasa depan, didasarkan pada kebutuhan penduduk baik untuk permukiman maupun kegiatan kota serta prasarana permukiman dan fasilitas sosial/ekonomi.
 - ❖ Karakteristik bangunan; konstruksi, kondisi, dan jenis bangunan.
 - ❖ Karakteristik perumahan dalam hal keadaan sosial ekonomi penghuni, keadaan fisik perumahan, kebutuhan prasarana lingkungan dan fasilitas sosial lingkungannya.
 - ❖ Karakteristik kawasan pusat kota, penggunaan bangunan, keadaan fisik bangunan, tingkat efisiensi dan intensitas penggunaan bangunan, kebutuhan pembangunan.
 - ❖ Karakteristik industri dalam hal jenis-jenis yang ada dan perkiraan di masa depan, pola produksi dan pemasaran, kebutuhan pengembangan, serta pengelolaan.

e. Analisis keuangan dan pengelolaan, antara lain menilai

- ❖ Perkiraan kemampuan keuangan di masa depan.
- ❖ Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan perkiraan sumber penerimaan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kota khususnya yang bersifat vital dan strategis.
- ❖ Keadaan organisasi aparatur pelaksana, dalam hal struktur, kewenangan, personalia, dan kebutuhannya di masa depan
- ❖ Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pembangunan kota.

3. *Analisa lingkup BWK*, meliputi :

- a) Perumusan RUTRK pada wilayah perencanaan
- b) Analisa kependudukan
- c) Analisa keadaan fasilitas dan prasarana
- d) Karakteristik tata letak bangunan

4.1.5. Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana

Pokok-pokok kegiatan pada langkah kegiatan penyusunan rancangan rencana beserta produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijaksanaan dasar pengembangan kota mencakup :
 - 1. Penentuan fungsi dan peranan kota.

2. Penentuan strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan bidang-bidang kegiatan pembangunan.
 3. Penentuan kebijaksanaan kependudukan yang memberi arahan perkembangan kuantitas intensitas, dan distribusi penduduk.
 4. Penentuan kebijaksanaan pengembangan tata ruang, yang memberi arahan pada ekstensifikasi dan intensifikasi penggunaan ruang kota.
 5. Penentuan kebijaksanaan pengelolaan pembangunan kota.
 6. Penentuan dimensi waktu dan wilayah perencanaan.
- b. merumuskan kebijaksanaan operational pengembangan kota, antara lain :
1. Rencana penggunaan lahan yang mengatur/mengarahkan penempatan dan intensitas tiap jenis penggunaan seperti :
 - ❖ Perumahan
 - ❖ Pemerintahan dan bangunan umum
 - ❖ Perdagangan
 - ❖ Jasa
 - ❖ Pelayanan sosial
 - ❖ Jalur hijau dan kawasan terbuka
 - ❖ Pembangunan khusus non perkotaan

2. Rencana indikasi unit pelayanan kota, antara lain :
 - ❖ Tata jenjang unit-unit perwilayahan kota.
 - ❖ Delineasi unit-unit pengembangan ruang kota
 - ❖ Identifikasi fungsi yang dominan pada tiap unit pengembangan ruang kota.
 - ❖ Pusat-pusat pengelompokan fasilitas pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi.
3. Rencana fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial, antara lain
 - ❖ Jenis, jumlah, dan distribusi fasilitas pelayanan ekonomi seperti fasilitas perdagangan dan jasa, serta industri.
 - ❖ Jenis, jumlah, dan distribusi fasilitas pelayanan sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan kegiatan sosial lainnya.
4. Rencana sistem jaringan pergerakan, antara lain
 - ❖ Rencana jaringan jalan yang menyangkut fungsi dan wewenang pengelolaan.
 - ❖ Rencana sistem angkutan umum
 - ❖ Rencana lokasi terminal dan lapangan parkir

5. Rencana sistem jaringan utilitas, antara lain :
 - ❖ Rencana jaringan air bersih
 - ❖ Rencana jaringan telepon
 - ❖ Rencana jaringan listrik
 - ❖ Rencana jaringan drainase
 - ❖ Rencana sistem pengelolaan sampah
 6. Rencana penanganan bangunan, antara lain ;
 - ❖ Koefisien Dasar Bangunan
 - ❖ Koefisien Lantai Bangunan
 - ❖ Garis Sempadan Bangunan
- c. Merumuskan kebijaksanaan dasar pengembangan BWK, mencakup :
1. Kebijakan penentuan fungsi BWK.
 2. Kebijakan penentuan struktur BWK.
 3. Kebijakan penentuan jenis dan intensitas sarana dan prasarana utama.
 4. Kebijakan kependudukan.
- d. Merumuskan kebijaksanaan operasional pengembangan BWK mencakup:
1. Indikasi pembagian unit-unit lingkungan.
 2. Rencana Kepadatan penduduk.

3. Rencana penggunaan lahan
 4. Rencana fasilitas pelayanan sosial dan utilitas.
 5. Rencana sistem transportasi.
- e. Merumuskan rencana pentahapan dan pengelolaan pembangunan:
1. Tahapan pelaksanaan yang mengatur prioritas pelaksanaan dan arahan pembangunan untuk tiap periode lima tahun.
 2. Indikasi program dan proyek pada tiap tahap lima tahunan.
 3. Merumuskan sumber-sumber pembiayaan pembangunan tiap fasilitas, prasarana, dan sarana.
 4. Pengorganisasian aparaturnya pelaksana pembangunan.
- f. Menyusun rancangan rencana kota untuk disajikan dan dibahas dalam forum seminar atau forum lainnya, dengan maksud antara lain :
1. Memperoleh masukan dan tanggapan untuk perbaikan
 2. Mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat

4.1.6. Tahap Kegiatan Penyusunan Rencana

Langkah kegiatan penyusunan rencana merupakan tahap akhir dari pekerjaan teknis penyusunan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK Pucuk. Didalam tahapan ini pokok pekerjaan yang dilakukan serta produk yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan Rancangan Rencana kota sesuai saran dan masukan yang diperoleh pada forum seminar.
- b. Menyusun rencana kota dimana pokok-pokok materinya sama dengan pokok-pokok materi pada rancangan rencana kota.
- c. Membuat album peta berisi peta-peta eksisting dan peta-peta rencana.

Lebih jelasnya, jadwal terinci dari kegiatan penyelesaian penyusunan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Pucuk dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel: 4.1
Time Scedule
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk
Kabupaten Lamongan

No	Kegiatan	Bulan															
		Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Kegiatan Persiapan																
	- Persiapan Survey	xx															
	- Persiapan Administrasi	xx															
	- Laporan Pendahuluan		xx														
2.	Survey																
	- Lapangan			xxxx	xx												
	- Instansi			xxxx													
3.	Kompilasi Data					xxxxxxx											
4.	Analisa Data									xxxxxxx							
5.	Rencana																
	- Draft Rencana											xx	xxxxxxx				
	- Revisi Rencana																xx
6.	Album Peta								xx	xxxxx					xxxxxxx		

4.2. Sistematika Pelaporan

Setiap tahapan pekerjaan dalam proses penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk diikuti dengan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan. Adapun jenis dan jumlah laporan kemajuan tersebut akan diatur sebagai berikut :

a) Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan merupakan laporan yang berisikan keseluruhan konsep, metoda survey, dan rencana kerja dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk. Selain itu di dalam Laporan Pendahuluan juga terdapat metodologi analisa rencana, model-model analisa yang digunakan, urutan langkah kegiatan, keterlibatan tenaga ahli, serta jadwal penyelesaian pekerjaan. Jumlah Laporan pendahuluan yang diserahkan sebanyak 10 buku dalam format kertas A4. Sesuai dengan jadwal seluruh pelaksanaan pekerjaan maka pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk akan dilaksanakan dalam waktu 120 Hari kalender.

b) Kompilasi Data

Buku Kompilasi Data disusun setelah dilakukan survey lapangan. Materinya merupakan data dan informasi Yang diperoleh dari survey lapangan.

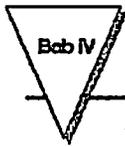
Sesuai dengan jenis rencana kota Yang disusun, maka materi buku Kompilasi Data untuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk paling tidak akan menyangkut informasi dalam lingkup regional dan lingkup kota Yang direncanakan. Materi yang diketengahkan adalah aspek kebijaksanaan, aspek fisik dasar, aspek kependudukan, aspek perekonomian, dan aspek pengelolaan kota. Jumlah buku Kompilasi Data Yang diserahkan sebanyak 10 buku dalam format kertas A3.

c) Analisa

Buku Analisa disusun setelah kegiatan kompilasi data dan analisa selesai dilakukan. Buku Analisa akan memuat seluruh proses analisa beserta hasil dari analisa tersebut. Seperti dalam buku Kompilasi Data, materi buku Analisa paling tidak akan berkisar pada masalah analisis yang sifatnya makro/regional dan analisis Yang sifatnya mikro/kota. Jumlah buku Analisa Yang diserahkan berjumlah 10 buku dalam format kertas A3.

d) Rancangan Rencana

Buku Rancangan Rencana merupakan kesimpulan dari hasil tabulasi data dan analisa serta akan memuat kebijaksanaan dasar pengembangan kota, kebijaksanaan operasional pengembangan kota, kebijaksanaan dasar pengembangan BWK, dan kebijaksanaan operasional pengembangan BWK.



Jumlah buku Rancangan Rencana Yang diserahkan berjumlah 10 buku dalam format kertas A4 (perkecilan A3).

e) Rencana

Buku Rancangan Rencana merupakan kesimpulan dari hasil rancangan rencana yang telah direvisi menurut hasil temuan dari kegiatan seminar yang memuat kebijaksanaan dasar pengembangan kota, kebijaksanaan operasional pengembangan kota, kebijaksanaan dasar pengembangan BWK, dan kebijaksanaan operasional pengembangan BWK serta Unit Lingkungan. Jumlah buku Rencana Yang diserahkan berjumlah 15 buku dalam format kertas A3.

Bab V

STRUKTUR
ORGANISASI
RUTRK/RDTRK KOTA PUCUK

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IKK PUCUK

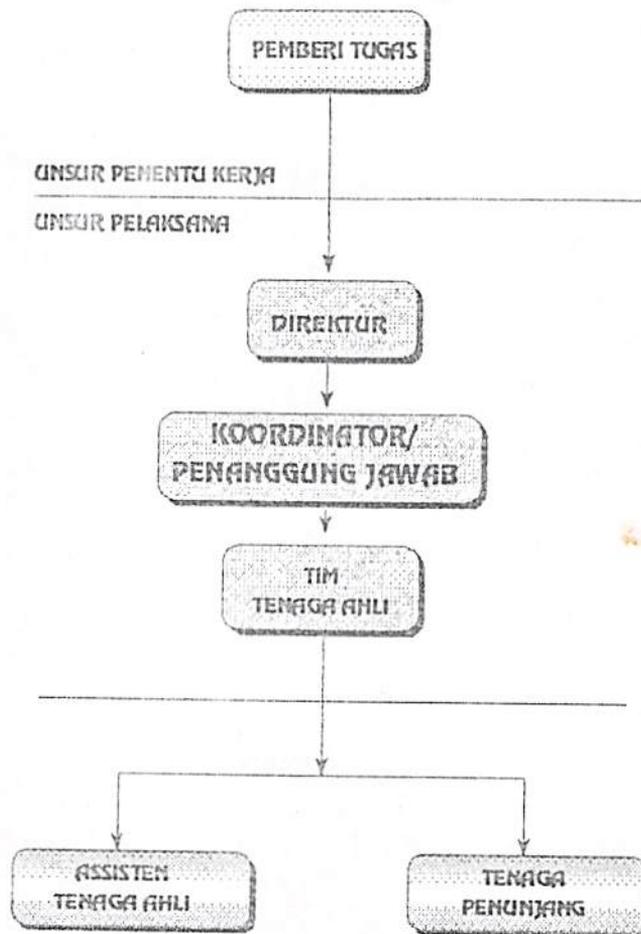
5.1. Struktur Organisasi

Dalam rangka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk, khususnya dalam pengelolaan/manajemen proyek, perlu disusun suatu struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Dengan struktur organisasi tersebut diharapkan agar pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

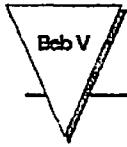
Penyusunan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, akan meliputi hubungan kerja antara pemberi tugas (Pemerintah Daerah) dan penerima/pelaksana pekerjaan (konsultan), dapat dilihat pada diagram dibawah ini. Struktur organisasi pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk seperti pada diagram dibawah ini.

Bagan 5.1.
Hubungan Kerja Penyusunan
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk



5.2. Mekanisme Pekerjaan

Mekanisme pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk, antara pihak pemberi tugas dan pelaksana pekerjaan (ekstern) serta intern konsultan.



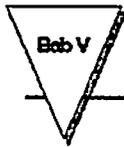
5.2.1. Mekanisme Kerja Ekstern

Dalam melaksanakan tugas, konsultan akan selalu mengadakan hubungan kerja dengan pihak pemberi tugas, khususnya para tenaga ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam penganalisaan yang berhubungan dengan penerapan kebijaksanaan Pemerintah, serta persyaratan teknis operasional dalam bidang perencanaan wilayah. Konsultan akan memperhatikan saran serta arahan yang diberikan, agar hasil pekerjaan ini terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat nantinya. Dengan demikian perlu dilakukan diskusi antara pemberi tugas dengan konsultan.

5.2.2. Mekanisme Kerja Intern Konsultan

Dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk, konsultan didalam mekanisme kerjanya memprioritaskan efektivitas dan efisiensi. Hal ini agar tidak terjadi pemborosan materi, tenaga dan waktu yang disusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penerapan mekanisme kerja didalam konsultan, terutama antara komponen dari struktur organisasi kerja pelaksana, dilakukan terpadu dan saling mengisi.

Dengan demikian konsultan mengajukan struktur organisasi kerja yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :



- » Mengkoordinir pekerjaan masing-masing staf ahli, sehingga dapat menjaga sinkronisasi pekerjaan.
- » Mengarahkan dan mempersiapkan program kerja.
- » Bertanggung jawab atas kerangka laporan yang akan diserahkan.
- » Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 4 bulan

□ **Tenaga Ahli Perencana Kota**

- » Bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan
- » Bertanggung jawab langsung terhadap Team Leader dalam hal teknis analisa kota.
- » Mengarahkan dan mempersiapkan program kerja perencanaan kota sehingga dicapai hasil yang maksimal.
- » Mensinkronisasi pekerjaan dengan staf ahli lainnya, sehingga terdapat sinkronisasi pekerjaan.
- » Menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Pucuk
- » Menentukan analisa yang akan dan telah dibuat oleh anggota tim.
- » Mengevaluasi studi-studi terdahulu.
- » Menentukan struktur ruang dari wilayah perencanaan, dalam kaitannya dengan struktur ruang makro.
- » Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 4 bulan

□ **Tenaga Ahli Perencanaan Sipil Transportasi**

- » Mengkaji kebijaksanaan transportasi regional dan kota.
- » Mengkaji pola dan sistem jaringan jalan, transportasi kota dan regional.

- » Mengidentifikasi jaringan jalan meliputi fungsi penggunaan jalan, wewenang pengelolaan, kondisi serta arus lalu lintas.
- » Merencanakan sistem pelaksanaan pembangunan jaringan jalan.
- » Menetapkan sistem jaringan jalan dan transportasi kota.
- » Menganalisis sistem utilitas kota.
- » Menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan utilitas kota
- » Merencanakan sistem utilitas kota.
- » Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan

□ *Tenaga Ahli Arsitektur*

- » Mengkaji kebijaksanaan perumahan.
- » Mengkaji pola dan sistem dan pola peruntukan.
- » Membantu tenaga ahli planologi dan geodesi dalam hal kelayakan lahan.
- » Menganalisis sistem perkotaan.
- » Menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan prasarana kota
- » Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan

□ *Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan*

- » Mengidentifikasi kebutuhan data yang berkaitan dengan aspek ekonomi.
- » Menyusun metode/teknik survey dan sekaligus mengolah hasil survey.
- » Menganalisa keadaan ekonomi, kebijaksanaan dan rencana pengembangan ekonomi kota.
- » Menetapkan pola/strategi rencana pengembangan kota.

- » Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan

□ **Asisten Ahli**

Disamping itu juga Tim Tenaga Ahli dibantu oleh beberapa tenaga penunjang untuk kelancaran pekerjaan, antara lain adalah :

- » Pengolah data elektronik/komputer
- » Drafter
- » Surveyor
- » Administrasi dan Keuangan

Tabel: 5.1

TIME SCHEDULE TENAGA AHLI
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk Kabupaten Lamongan

No.	KEGIATAN	BULAN KE-			
		1	2	3	4
1.	Koordinator Teknis				
	Ahli Teknik Sipil	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2.	TENAGA AHLI :				
	- Ahli Teknik Planologi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Ahli Teknik Sipil		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Ahli Teknik Arsitektur		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Ahli Ekonomi		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Ahli Sosial		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3.	TENAGA PENDUKUNG :				
	- Asisten Tenaga Ahli	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Juru Gambar	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Juru Ketik/Komputer	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Staff Administrasi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	- Staff Umum	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

**CHECK LIST DATA INSTANSIONAL
UNTUK PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK KOTA PUCUK**

NO.	DATA YANG DIBUTUHKAN	NAMA INSTANSI	TAHUN				
			1996	1997	1998	1999	2000
1.	<input type="checkbox"/> Buku perhitungan APBD	Bappeda					
2.	<input type="checkbox"/> Buku Pola Dasar Pembangunan Daerah						
3.	<input type="checkbox"/> Buku Repelitada Kabupaten						
4.	<input type="checkbox"/> Daftar inventaris program & proyek						
5.	<input type="checkbox"/> Organisasi - Struktur Organisasi Pemerintahan - Prosedur izin bangunan/perencanaan						
6.	<input type="checkbox"/> Buku RTRW Kab., RDTRK, RUTRK						
7.	<input type="checkbox"/> Peta-peta Kab. & Kecamatan yang ada						
8.	<input type="checkbox"/> Program & proyek Inpres yang sedang dilaksanakan maupun dalam rencana						
9.	<input type="checkbox"/> Buku Data Pokok dan beberapa informasi tentang permasalahan pelaksanaan tentang pembangunan						
1.	<input type="checkbox"/> Data PDRB di wilayah yang direncanakan	Dinas Pendapatan Daerah					
2.	<input type="checkbox"/> Data PDRB Kabupaten Lamongan						
3.	<input type="checkbox"/> Bantuan luar negeri/dalam negeri u/Proyek bantuan di Lamongan/Pucuk						
1.	<input type="checkbox"/> Jumlah kegiatan perdagangan tiap Desa diperinci menurut warung, kios, toko, (dilengkapi dengan peta)	Kantor perdagangan/bagian Perekonomian Kab.					
2.	<input type="checkbox"/> Jumlah dan lokasi pasar serta jumlah pedagang yang ada dan di luar pasar tentang pedagang besar (Grosir)						
3.	<input type="checkbox"/> Rencana Pengem. Pusat Perdagangan						
1.	<input type="checkbox"/> Lamongan Dalam Angka	Kantor Statistik					
1.	<input type="checkbox"/> Panjang, lebar dan luas jalan dalam wilayah perencanaan (disertai peta)	Pekerjaan umum (PU) Kab.					
2.	<input type="checkbox"/> Panjang dan lebar saluran sanitasi Pematusan						
1.	<input type="checkbox"/> Persampahan	Bagian Kebersihan/pertamanan					
2.	<input type="checkbox"/> Daerah kota yang tergenang banjir						
3.	<input type="checkbox"/> Lapangan terbuka / hijau						
4.	<input type="checkbox"/> strem sungai, rel, tegangan tinggi, jalan						
1.	<input type="checkbox"/> Peraturan Daerah tentang sempadan	Bagian hukum					

Lanjutan

NO.	DATA YANG DIBUTUHKAN	NAMA INSTANSI	TAHUN				
			1996	1997	1998	1999	2000
1.	<input type="checkbox"/> Peta wilayah perencanaan skala 1:10.000 dan 1:5.000	Kantor Pertanahan Kab. Lamongan					
2.	<input type="checkbox"/> Peta tata guna lahan						
3.	<input type="checkbox"/> Status kepemilikan lahan						
4.	<input type="checkbox"/> Harga/nilai tanah						
5.	<input type="checkbox"/> Peta Topografi						
6.	<input type="checkbox"/> Peta Penyebaran fasilitas						
7.	<input type="checkbox"/> Peta wilayah terbangun						
8.	<input type="checkbox"/> Peta kepadatan penduduk dll						
1.	<input type="checkbox"/> Iklim, curah hujan, arah angin dan kelembaban udara	Meteorologi & Geofisika					
1.	<input type="checkbox"/> Kapasitas terpasang listrik	P L N					
2.	<input type="checkbox"/> Jumlah pelanggan						
3.	<input type="checkbox"/> Rencana pengembangan						
1.	<input type="checkbox"/> Kapasitas terpasang Telkom	TELKOM					
2.	<input type="checkbox"/> Jumlah pelanggan						
3.	<input type="checkbox"/> Rencana pengembangan						
1.	<input type="checkbox"/> Debit pengaliran	PDAM					
2.	<input type="checkbox"/> Jumlah pelanggan						
3.	<input type="checkbox"/> Peta jaringan pipa						
4.	<input type="checkbox"/> Rencana pengembangan						
1.	<input type="checkbox"/> Buku potensi desa	SUB UNIT BANGDES					
2.	<input type="checkbox"/> Kebijakan pembangunan desa						
3.	<input type="checkbox"/> Jumlah dan alokasi bantuan desa						
4.	<input type="checkbox"/> Rencana pengembangan mendatang						
1.	<input type="checkbox"/> Peta topografi	BALAI KONSERVASI TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM					
2.	<input type="checkbox"/> Peta pertambangan						
3.	<input type="checkbox"/> Peta geologi						
4.	<input type="checkbox"/> Peta struktur tanah						
5.	<input type="checkbox"/> Peta hidrologi						
1.	<input type="checkbox"/> Buku Kecamatan dalam angka	KANTOR KECAMATAN					
2.	<input type="checkbox"/> Monografi Kecamatan						
3.	<input type="checkbox"/> Profil Desa						